LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM

PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

PEMBIMBING:

Milly Mildawati, Ph.D

Oleh:

MUHAMMAD RIDHWAN HAKIM
NRP. 20.03.057

POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG

2023

LEMBAR PENGESAHAN

Judul	:	LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL
Nama Mahasiswa	:	Muhammad Ridhwan Hakim
NRP	:	20.03.057
Program	:	Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

Pembimbing:

Milly Mildawati, M.P, Ph.D

Mengetahui:

Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
Program Sarjana Terapan
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung,

Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiraat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, serta petunjuk dan kemudahan yang selalu diberikan oleh-Nya praktikan mampu melaksanakan Praktikum Laboratorium dengan tetap bersyukur dan mampu menyelesaikan laporan Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial ini dengan tepat waktu.

Tersusunnya laporan ini tentu bukan karena buah kerja keras praktikan semata, melainkan juga atas bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu terselesaikannya laporan ini, diantaranya:

1. Dr. Marjuki, M.Sc, selaku Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
2. Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
3. Dra. Atirista Nainggolan, M.P, selaku Ketua Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
4. Milly Mildawati, Ph.D, selaku Dosen Pembimbing Praktikum Laboratorium Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan kepada penyusun dengan penuh kesabaran dan pengorbanan waktu selama kegiatan praktikum laboratorium.
5. Rekan-rekan anggota kelompok 4 yang selalu memberikan motivasi selama pelaksanaan praktikum laboratorium
6. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan mendoakan terlaksananya kegiatan praktikum laboratorium.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, semoga bermanfaat bagi pembaca sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan danpraktik pekerjaan sosial.

Bandung, April 2023

Praktikan

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR vii
DAFTAR LAMPIRAN viii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2.1 Tujuan Praktikum 1
1.3 Waktu dan Lokasi Praktikum 3
1.3.1 Waktu Praktikum 3
1.3.2 Lokasi Praktikum 4
1.4 Proses Praktikum 4
1.4.1 Tahap Persiapan 4
1.4.2 Tahap Lapangan 5
1.4.3 Tahap Pasca Lapangan 12
1.4.4 Supervisi 12
BAB II PRAKTIKUM LABORATORIUM 14
2.1 Profil Analis Jaminan Sosial 14
2.1.1 Gambaran Umum 14
2.1.2 Tinjauan Konsep 15
2.1.3 Asesmen 19
2.1.4 Rencana Intervensi 23
2.2 Profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial 30
2.2.1 Gambaran Umum 30
2.2.2 Tinjauan Konsep 31
2.2.3 Asesmen 32
2.2.3 Rencana Intervensi 36
2.3 Profil Analis Pemberdayaan Sosial 44
2.3.1 Gambaran Umum 44
2.3.2 Tinjauan Konsep 45

2.3.3 Asesmen 46
2.3.4 Rencana Intervensi 50
2.4 Profil Analis Penataan Lingkungan Sosial 59
2.4.1 Gambaran Umum 59
2.4.2 Tinjauan Konsep 60
2.4.3 Asesmen 61
2.4.4 Rencana Intervensi 64
2.5 Profil Analis Penanggulangan Bencana 72
2.5.1 Gambaran Umum 72
2.5.2 Tinjauan Konsep 73
2.5.2 Asesmen 75
2.5.3 Rencana Intervensi 79
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 87
a. Kesimpulan 87
b. Rekomendasi 87
DAFTAR PUSTAKA..... 89
LAMPIRAN 90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sistem Partisipan Analisis Jaminan Sosial ……...……...25

Tabel 2.2 Rencana Anggaran Biaya Analisis Jaminan Sosial …...……..26

Tabel 2.3 SWOT Analisis Jaminan Sosial ……..27

Tabel 2.4 Susunan Acara Sosialisasi BPJS Kesehatan ……29

Tabel 2.5 Sistem partisipan Sosialisasi PKH ……..38

Tabel 2.6 RAB Sosialisasi PKH ……..39

Tabel 2.7 SWOT Sosialisasi PKH ……...……...41

Tabel 2.8 Susunan acara Sosialisasi PKH ……...42

Tabel 2.9 Sistem partisipan Program Pemberdayaan ……..52

Tabel 2.10 RAB Program Pemberdayaan ……...53

Tabel 2.11 Kebutuhan alat Program Pemberdayaan ……...53

Tabel 2.12 SWOT Program Pemberdayaan ……...……..54

Tabel 2.13 Susunan acara Program Pemberdayaan ……57

Tabel 2.14 Sistem partisipan Program Sosialisasi Ruang Terbuka ……66

Tabel 2.15 RAB Program Sosialisasi Ruang Terbuka……68

Tabel 2.16 SWOT Program Sosialisasi Ruang Terbuka ……69

Tabel 2.17 Susunan acara Program Sosialisasi Ruang Terbuka ……..71

Tabel 2.18 Sistem partisipan Mitigasi Gempa ……81

Tabel 2.19 RAB Mitigasi Gempa ……82

Tabel 2.20 Daftar kebutuhan alat Mitigasi Gempa ……82

Tabel 2.21 SWOT Mitigasi Gempa ……83

Tabel 2.22 Susunan acara Mitigasi Gempa ……85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Analisis Pohon Masalah Jaminan Sosial 21

Gambar 2.2 Analisis Pohon Masalah Analisis Bantuan Sosial 34

Gambar 2.3 Analisis Pohon Masalah Pemberdayaan 49

Gambar 2.4 Analisis Pohon Manajemen Bencana 63

Gambar 2.5 Analisis Pohon Masalah Bencana.....77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permohonan Izin Praktikum Laboratorium 90
Lampiran 2: Kegiatan Praktikum Laboratorium di Kelurahan Cicaheum.....91
Lampiran 3: Bimbingan Praktikum Laboratorium 93

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Polikteknik Kesejahteraan Sosial Bandung merupakan lembaga pendidikan tinggi dibawah Kementerian Sosial Republik Indonesia. Poltekesos memiliki wadah Pendidikan tidak hanya melalui pembelajaran dalam kelas dan pembelajaran melalui praktikum laboratorium atau praktik. Praktikum laboratorium ini menjadi tempat bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan-keterampilan dasar dan keterampilan-keterampilan khusus dalam melakukan proses asesmen hingga proses rencana intervensi pekerjaan sosial. Sehingga mahasiswa diharapkan mampu memahami keterampilan dalam praktik aras mikro, meso, dan makro, baik dalam bekerja dengan individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi sosial. Praktik laboratorium ini disamping melaksanakan aktivitas dalam ruangan, mahasiswa diberikan kesempatan melakukan aktivitas di masyarakat atau organisasi sosial untuk memahami fenomena sosial yang ada di masyarakat.

Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial menjadi bagian penting dalam membentuk profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Profil lulusan yaitu Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana. Melalui praktikum laboratorium, mahasiswa diharapkan dapat meningkatakan kemampuan dalam mealakukan keterampilan praktik intervensi pekerjaan sosial mulai proses awal hingga pengakhiran melalui melalui aktivitas di dalam laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Demikian pula dalam praktikum laboratorium berfokus pada penguasaan keterampilan dasar dan keterampilan proses intervensi pekerjaan sosial dalam menangani permasalahan sosial di masyarakat dan organisasi sosial.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Pelaksanaan kegiatan praktikum laboratorium ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan praktikan dalam melakukan keterampilan praktik intervensi pekerjaan sosial mulai proses awal hingga pengakhiran serta mampu mengimplementasikan keterampilan dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.

1.2.1 Tujuan Praktikum

Tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Buku Pedoman Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yaitu sebagai berikut:

a. Sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, perbedaan agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan

orisinil orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;

b. Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial;
c. Kemampuan untuk mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial;
d. Kemampuan untuk mempraktikan keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial;
e. Memiliki keterampilan dalam melakukan proses intervensi pekerjaan sosial meliputi tahapan:
   1) Pendekatan Awal
   2) Asesmen
   3) Perencanaan Intervensi

1.2.2 Manfaat Praktikum

Selain berdasarkan tujuan yang ingin dicapai diatas, kegiatan praktikum ini juga dirancang untuk meningkatkan kemampuan praktikan dalam melakukan keterampilan praktik intervensi pekerjaan sosial mulai proses awal hingga pengakhiran serta mampu mengimplementasikan keterampilan dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial, maka manfaat yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
   a. Terbentuknya sikap mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasar agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinil orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
   b. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam menerapkan

metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.

c. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
d. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mempraktikan keterampilanketerampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
e. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya secara nyata dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
f. Mahasiswa memiliki keterampilan dalam proses intervensi pekerjaan sosial meliputi tahapan :
   1) Pendekatan awal;
   2) Asesmen;
   3) Perencanaan Intervensi;
   4) Intervensi;
   5) Evaluasi, rujukan, dan terminasi.

2. Bagi Lembaga
   a. Meningkatnya kualitas kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung;
   b. Sebagai alat evaluasi untuk perbaikan kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

1.3 Waktu dan Lokasi Praktikum

Kegiatan praktikum laboratorium memiliki fokus untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa yang disini sebagai praktikan agar mampu meingkatkan keterampilan praktik intervensi pekerjaan sosial yang berfokus kepada 5 (lima) pembentukan profil lulusan perlindungan dan pemberdayaan sosial yaitu sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana.

1.3.1 Waktu Praktikum

Praktikum laboratorium program studi perlindungan dan pemberdayaan sosial dilaksanakan di Kelurahan Cicaheum Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. Mahasiswa melaksanakan kegiatan praktikum selama 2 (dua) bulan selama 6 jam per hari dilaksanakan hari

Rabu sampai hari Sabtu pada setiap minggunya selama satu semester (17 minggu), pelaksanaan praktikum laboratorium dilaksanakan sejak tanggal 8 Februari sampai 14 April 2023. Pelaksanaan kegiatan praktikan dilakukan berdasarkan tempat yang telah ditentukan oleh lembaga dan dilakukan secara luring dengan melakukan pengumpulan informasi menggunakan data baik itu primer maupun sekunder.

Dengan mengambil lokasi di Kelurahan Cicaheum Kecamatan Kiaraconodong Kota Bandung berdasarkan ketentuan oleh lembaga Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang mengharuskan kegiatan praktikan dilaksanakan di wilayah tempat tinggal masing-masing, pada semester VI Tahun Akademik 2022/2023 ini, jadwal praktikum laboratorium dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut ini :

a. Pra Lapangan : 28 Januari s.d. 3 Februari 2021
b. Lapangan : 8 Februari s.d. 14 April 2023
c. Ujian lisan : 2 Mei s.d. 3 Mei 2023

1.3.2 Lokasi Praktikum

Pelaksanaan praktikum dilaksanakan di Kelurahan Cicaheum Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

1.4 Proses Praktikum

Dalam prosesnya praktikum laboratorium dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1.4.1 Tahap Persiapan

a. Pembekalan Umum

Pembekalan praktikum laboratorium dengan narasumber Ibu Gayatri Waditra Nirwesti, ME dilaksanakan pada hari Kamis 2 Februari 2023 pada pukul 08.00 WIB secara luring yang bertempat di gedung Pascasarjana. Pembekalan ini dihadiri oleh mahasiswa praktikan program studi perlindungan dan pemberdayaan sosial semester VI, Ibu Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D selaku Kepala Prodi D-IV Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, Ibu Dra. Atirista Nainggolan, M.P selaku Ketua Laboratorium Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Agenda kegiatan pembekalan praktikum ini yaitu menjelaskan mengenai Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial yang berlangsung hingga pukul 11.30 WIB dan diakhiri dengan sesi diskusi tanya jawab bersama praktikan.

b. Bimbingan Pra Praktikum

Praktikan juga melaksanakan bimbingan pra praktikum, studi literatur, dan penugasan oleh dosen pembimbing sesuai dengan tanggal yang telah dijadwalkan oleh lembaga. Praktikan dibimbing oleh Ibu Milly

Mildawati, Ph.D yang dimana dosen pembimbing bertugas sebagai supervisor selama kegiatan praktikum yang akan terus membantu praktikan apabila terdapat hambatan atau kendala dalam proses pelaksanaan praktikum di lapangan. Hasil dari bimbingan pra lapangan yaitu :

1) Bimbingan pra praktikum dilaksanakan pada hari Jumat, 27 Januari 2023 oleh Ibu Milly Mildawati Ph.D sebagai pembimbing kelompok di Gedung Pascasarjana. Pada pertemuan pertama ini dilakukan perkenalan terlebih dahulu, pembahasan pedoman praktikum dan jadwal pelaksanaan praktikum.
2) Membahas isu-isu dari 5 profil prodi Lindayasos, yaitu Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, Analis Penanggulangan bencana.

c. Serah Terima Praktikan. Dilaksanakan kegiatan Serah Terima Praktikan Kepada Dosen Pembimbing Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, secara luring di kantor Kelurahan Cicaheum pada pukul 10.00 WIB di hari Rabu, 3 Februari 2023 didampingi oleh Ibu Milly Mildawati Ph.D selaku pembimbing kelompok.

1.4.2 Tahap Lapangan

Tahap lapangan dilaksanakan dalam lima sesi sesuai dengan profil lulusan prodi Lindayasos yaitu praktik sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana. Setiap sesi tersebut dilaksanakan selama 14 hari kalender, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial

1) Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial oleh praktisi/pakar membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola pelaksanaan sistem jaminan sosial, yang meliputi:
   a. Berbagai isu dalam implementasi jaminan sosial;
   b. Model jaminan sosial yang digunakan;
   c. Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan jaminan sosial;
   d. Merancang program jaminan sosial;
   e. Melakukan analisis kelayakan rancangan program jaminan sosial;
   f. *Stakeholder* terkait program jaminan sosial.
2) Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial oleh dosen

yang diberi tugas, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analis Jaminan Sosial, sebagai berikut

a. Mengetahui konsep teoritis kebutuhan dasar manusia;
b. Memahami konsep masalah sosial dan masalah kesejahteraan sosial;
c. Mengetahui konsep perlindungan dan jaminan sosial;
d. Mengetahui konsep standar praktik pekerjaan sosial.

3) Keterampilan

a. Mampu melaksanakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat;
b. Mampu menganalisis dan menyusun program perlindungan dan jaminan sosial untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
c. Mampu menganalisis dan menyusun program bantuan sosial;
d. Mampu menganalisis dan menyusun program advokasi sosial;
e. Mampu menganalisis dan menyusun program pemberian akses bantuan hukum.

4) Praktikum Analis Jaminan Sosial, meliputi :

a. Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data primer maupun sekunder;
b. Menyusun rencana intervensi sesuai dengan kasus/isu permasalahan yang terjadi di Kelurahan Cicaheum.
c. Menyusun laporan praktik analis jaminan sosial.

b. Peningkatan Kompetensi Analis Sumber Dana Bantuan Sosial

1) Peningkatan Kompetensi Analis Sumber Dana Bantuan Sosial oleh praktisi/industri membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola sumber dana bantuan sosial, yang meliputi:

a. Berbagai isu dalam implementasi sumber dana bantuan sosial;
b. Model sumber dana bantuan sosial,yang digunakan;
c. Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
d. Merancang program sumber dana bantuan sosial;
e. Melakukan analisis kelayakan rancangan program sumber danabantuan sosial;
f. *Stakeholder* terkait program sumber dana bantuan sosial.

2) Peningkatan Kompetensi Analis Sumber Dana Bantuan Sosial oleh CSR Manajer PT. AAPC Indonesia, dengan materi :
   a. Pembekalan Materi tentang gambaran umum program sumber dana bantuan sosial;
   b. Kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa Prodi Lindayasos untuk melaksanakan pekerjaan terkait sumber dana bantuan sosial;
   c. Peluang kerja terkait bidang sumber dana bantuan sosial.
3) Peningkatan Kompetensi Analis Sumber Dana Bantuan Sosial oleh dosen yang ditugaskan, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, sebagai berikut:
   a. Pengetahuan;
      a. Menguasai konsep bantuan sosial dan jenisnya;
      b. Menguasai konsep sumber dana bantuan sosial;
      c. Menguasai konsep penggalangan dana dan prinsip-prinsip penggalangan dana bantuan sosial;
      d. Menguasai konsep perencanaan dalam penggalangan danabantuan sosial;
      e. Menguasai konsep pelaksanaan dan kebijakan penggalangan dana bantuan sosial;
      f. Menguasai konsep monitoring dan evaluasi dalam penggalangan dana bantuan sosial.
   b. Keterampilan
      a. Mampu menganalisis dan menyusun program perencanaan dalam penggalangan dana dan pengelolaan bantuan sosial;
      b. Mampu dalam menganalisis dan menyusun program pelaksanaan dalam penggalangan dana dan pengelolaan bantuan sosial;
      c. Mampu menganalisis dan menyusun program monitoring dan evaluasi dalam penggalangan dana dan pengelolaan bantuan sosial;
      d. Mampu menganalisis dan menyusun sistem pelaporan dalampenggalangan dana dan pengelolaan bantuan sosial;
      e. Mampu menganalisis dan menyusun sistem informasi dan komunikasi dalam penggalangan dana pengelolaan bantuan sosial.
4) Praktik Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, meliputi :
      a. Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data

sekunder;

b. Menyusun Rencana Intervensi;
c. Menyusun laporan praktik analis sumber dana bantuan sosial.

c. Peningkatan Kompetensi Analis Pemberdayaan Sosial

1) Peningkatan Kompetensi Analis Pemberdayaan Sosial oleh praktisi/industri membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola Pemberdayaan Sosial, yang meliputi:
   a. Berbagai isu dalam implementasi pemberdayaan sosial;
   b. Model pemberdayaan sosial,yang digunakan;
   c. Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam Pemberdayaan Sosial;
   d. Merancang program Pemberdayaan Sosial;
   e. Melakukan analisis kelayakan rancangan program Pemberdayaan Sosial;
   f. *Stakeholder* terkait program Pemberdayaan Sosial.
2) Peningkatan Kompetensi Analis Pemberdayaan Sosial oleh Project Manajer Yayasan Usaha Mulia, dengan materi :
   a. Pembekalan Materi tentang gambaran umum program pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
   b. Kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa Prodi Lindayasos untuk melaksanakan pekerjaan terkait pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
   c. Peluang kerja terkait bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat.
3) Peningkatan Kompetensi Analis Pemberdayaan Sosial oleh dosen yang ditugaskan, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analis Pemberdayaan Sosial, sebagai berikut:
   a. Pengetahuan
      1. Menguasai Konsep kebutuhan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam pemberdayaan sosial;
      2. Menguasai Konsep dan teknologi pemberdayaan sosial;
      3. Menguasai Konsep sumber daya penyelenggaraan sosial dalam pemberdayaan sosial;
      4. Menguasai Konsep supervisi dalam program

pemberdayaan sosial;

5. Menguasai konsep pendampingan sosial dan penguatankelembagaan sosial dalam pemberdayaan sosial;
6. Menguasai konsep keserasian sosial dan pemasaran hasil usaha dalam pemberdayaan sosial.

b. Keterampilan

1. Mampu mengidentifikasi permasalahan dan sumber daya yang dapat dikembangkan dalam pemberdayaan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
2. Mampu menganalisis dan menyusun program penumbuhan kesadaran dan pemberian motivasi dalam pemberdayaan sosial;
3. Mampu menganalisis dan menyusun program pemberian keterampilan dalam pemberdayaan sosial;
4. Mampu menganalisis dan menyusun program penguatan kelembagaan dalam masyarakat dalam pemberdayaan sosial;
5. Mampu melaksanakan program pendampingan sosial untuk pemberdayaan sosial;
6. Mampu menganalisis dan menyusun program kemitraan dan penggalangan dana untuk pemberdayaan sosial;
7. Mampu melaksanakan pemberian akses terhadap stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
8. Mampu melaksanakan peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
9. Mampu melaksanakan supervisi dan advokasi sosial dalam pemberdayaan sosial serta mampu menganalisis dan menyusun program keserasian sosial dan bimbingan lanjut dalam pemberdayaan sosial.

4) Praktik Analis Pemberdayaan Sosial, meliputi :

a. Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data sekunder;
b. Menyusun Rencana Intervensi;
c. Menyusun laporan praktik analis pemberdayaan sosial.

d. Peningkatan Kompetensi Analis Penataan Lingkungan Sosial

1) Peningkatan Kompetensi Analis Penata Lingkungan Sosial oleh praktisi/industri membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola Penataan Lingkungan Sosial, yang meliputi:

a. Berbagai isu dalam mengelola penataan lingkungan sosial;
b. Model penataan lingkungan sosial yang digunakan;
c. Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam penataan lingkungan sosial;
d. Merancang program penataan lingkungan sosial;
e. Melakukan analis kelayakan rancangan program penataan lingkungan sosial;
f. *Stakeholder* terkait program Penataan Lingkungan Sosial.

2) Peningkatan Kompetensi Analis Penataan Lingkungan Sosial oleh Deputi 1 CEO, Islamic Relief Indonesia, dengan materi :
   a. Pembekalan Materi tentang gambaran umum program Penataan Lingkungan Sosial;
   b. Kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa Prodi Lindayasos untuk melaksanakan pekerjaan terkait Penataan Lingkungan Sosial;
   c. Peluang kerja terkait bidang Penataan Lingkungan Sosial.
3) Peningkatan Kompetensi Analis penataan lingkungan sosial oleh dosen yang ditugaskan, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analis Penataan Lingkungan Sosial, sebagai berikut:
   a. Pengetahuan
      1. Menguasai Konsep ekologi manusia dalam lingkungan sosial;
      2. Menguasai Konsep krisis lingkungan, konflik sosial, danurbanisasi;
      3. Menguasai Konsep degradasi lingkungan dan bencana alam;
      4. Menguasai Konsep adaptasi ekologi manusia;
      5. Menguasai Konsep interaksi sosial-ekologi dalam suatu sistem sosial komunitas dan ekosistem;
      6. Menguasai Konsep kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam;
      7. Menguasai Konsep praktik pekerjaan sosial dalam penataan lingkungan sosial.
   b. Keterampilan
      1. Mampu menganalisis hubungan permasalahan lingkungan dengan munculnya masalah sosial;
      2. Mampu menganalisis dan menyusun program pengembangan kearifan lokal dalam pengelolaan

sumber daya alam;

3. Mampu menganalisis dan menyusun program penataan lingkungan sosial dalam peningkatan keberfungsian individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

4) Praktik Teknologi Analis Penataan Lingkungan Sosial, meliputi:
   a. Asesmen dengan menggunakan data sekunder;
   b. Menyusun Rencana Intervensi;
   c. Menyusun laporan praktik Analis Penataan Lingkungan Sosial.

e. Peningkatan Kompetensi Analis Penanggulangan Bencana

1) Peningkatan Kompetensi Analis Penanggulangan Bencana oleh praktisi/industri membahas tentang pengalaman praktisi dalam penanggulangan bencana, yang meliputi :
   a. Berbagai isu dalam penanggulangan bencana;
   b. Model penanggulangan bencana yang digunakan;
   c. Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam penanggulangan bencana;
   d. Merancang program penanggulangan bencana;
   e. Melakukan analisis kelayakan rancangan program penanggulangan bencana;
   f. *Stakeholder* terkait program penanggulangan bencana.
2) Peningkatan Kompetensi Analis Penanggulangan Bencana oleh Perencana Ahli Madya BNPB Jakarta, dengan materi :
   a. Gambaran umum program Penanggulangan Bencana;
   b. Kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa Prodi Lindayasos untuk melaksanakan pekerjaan terkait penanggulangan bencana;
   c. Peluang kerja terkait bidang penanggulangan bencana.
3) Peningkatan Kompetensi Analis Penanggulangan Bencana oleh dosen yang ditugaskan, dengan materi mengacu pada kompetensi Profil Analis Penanggulangan Bencana, sebagai berikut:
   a. Pengetahuan
      1. Menguasai Konsep bencana alam dan non alam serta jenis-jenisnya;
      2. Menguasai konsep masalah bencana dan sistem penanggulangan bencana;
      3. Menguasai Konsep mitigasi bencana, dan pengurangan risiko bencana;

4. Menguasai Konsep perlindungan korban bencana pada saatstatus darurat bencana;
5. Menguasai konsep standar minimum pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

b. Keterampilan
1. Mampu melaksanakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk pengurangan risiko bencana;
2. Mampu menganalisis dan menyusun program perlindungan korban pada saat status darurat bencana;
3. Mampu menganalisis pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan pengungsi
4. Mampu menganalisis dan menyusun program pemberdayaan korban bencana pasca bencana
5. Mampu menganalisis dan menyusun program pengembangan masyarakat resilien terhadap bencana.

4) Praktik Teknologi Analis Penanggulangan Bencana, meliputi :
a. Melakukan Assesmen, dengan menggunakan data sekunder
b. Menyusun Rencana Intervensi
c. Menyusun laporan praktik penanggulangan bencana.

1.4.3 Tahap Pasca Lapangan

Berakhirnya kegiatan praktikum laboratorium mahasiswa Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Poltekesos Bandung, maka para praktikan mulai menyusun laporan individu melalui sistematika penyusunan laporan yang diperoleh dari buku pedoman praktikum mahasiswa prodi lindayasos Poltekesos Bandung. Laporan individu kemudian akan dikoreksi oleh dosen pembimbing Ibu Milly Mildawati, Ph.D kemudian akan di sahkan sebagai laporan yang akan disampaikan pada saat sidang atau ujian lisan. Berikut tahapan pasca lapangan:

a. Finalisasi Laporan
b. Ujian Lisan Praktikum
c. Perbaikan dan Penyerahan laporan

1.4.4 Supervisi

Kegiatan supervisi dan evaluasi dilakukan oleh dosen pembimbing yaitu Ibu Milly Mildawati, Ph.D Waktu pelaksanaan supervisi dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kegiatan supervisi dilaksanakan secara luring dengan tahapan sebagai berikut :

a. Bimbingan pra praktikum pertama dilaksanakan pada pukul 14.00 WIBdi hari Jumat, 27 Januari 2023 oleh Ibu Milly Mildawati, Ph.D secara luring yang bertempat di Gedung Pascasarjana. Pada

bimbingan ini membahas mengenai perkenalan anggota kelompok, selain itu praktikan diberikan materi pembahasan pedoman praktikum laboratorium program studi perlindungan dan pemberdayaan sosial, diberikan penugasan membuat pengertian serta contoh isu dan penyelesaian dari 5 (lima) profil Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

BAB II
PRAKTIKUM LABORATORIUM

2.1 Profil Analis Jaminan Sosial

2.1.1 Gambaran Umum

Hak asasi manusia merupakan hak yang sudah melekat pada diri manusia sejak lahir di dunia ini dan sudah merupakan kewajiban Negara untuk melindungi hak asasi setiap rakyatnya. Salah satu prinsip dasar yang menjiwai hak-hak asasi manusia internasional yaitu prinsip kesetaraan dan non- diskriminasi (*equality and non-discrimination*). Salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh Negara yaitu hak kesehatan. Upaya Negara untuk melindungi hak kesehatan rakyatnya yaitu melalui jaminan kesehatan.

Pemenuhan hak atas kesehatan bagi rakyat Indonesia telah diamanatkan dalam Sila ke lima Pancasila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 (h) ayat 1 yaitu: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan."

Upaya negara untuk menjamin kesehatan rakyat Indonesia yaitu melaui Jaminan Kesehatan telah diamanatkan melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (2) yaitu: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."

Definisi Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat peliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi keutuhan dasar yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Perwujudan Jaminan Kesehatan di Negara Indonesia yaitu melalui upaya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN dilatarbelakangi oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) atau Universal Independent of Human Right, yang dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1948. Selain itu, resolusi World Health Assembly (WHA) ke 58 Tahun 2005 di Kota Jenewa, Swiss menyatakan bahwa setiap negara disarankan mengembangkan *Universal Health Coverage* dengan langkah program asuransi kesehatan sosial untuk menjamin pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan.

Hak jaminan kesehatan seharusnya mencakup seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Penyandang Disabilitas. Selama ini hak jaminan Kesehatan Penyandang Disabilitas masih disamakan dengan masyarakat lain pada umumnya. Walaupun hak dan kewajiban Penyandang Disabilitas sama dengan masyarakat lainnya, namun Penyandang Disabilitas butuh diberi perlakuan khusus karena

lebih rentan dibanding dengan masyarakat lainnya. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dan ketika dihadapkan dengan hambatan- hambatan, mereka tidak dapat berpartisipasi secara penuh dan efektifitas mereka di dalam masyarakat dapat terhalang berdasarkan kesetaraan dengan masyarakat lainnya.

Kondisi Penyandang Disabilitas dalam hal jaminan kesehatan terutama yang berada bertempat tinggal di Kelurahan Cicaheum Kecamatan Kiaracondong. Total terdapat 26 masyarakat Penyandang Disabilitas dengan jenis yang berbeda, seperti cacat mental, fisik, intelektual, dan sensorik. Memang kebanyakan dari Penyandang Disabilitas ini sudah mengikuti program BPJS Kesehatan untuk mendapatkan obat atau bantuan lainnya dari pemerintah, namun kendala yang terjadi adalah keluarga dari Penyandang Disabilitas ini masih kesulitan dan kebingungan ketika ingin mengakses dan memanfaatkan BPJS Kesehatan. Akibatnya adalah mereka tidak jadi mengakses dan memanfaatkan bantuan yang sudah diberikan pemerintah bagi peserta BPJS Kesehatan.

Dari keterangan yang didapatkan melalui wawancara dengan pihak kelurahan, apabila mereka jatuh sakit, mereka masih mengandalkan dana pribadi dengan membeli obat-obatan yang tersedia di warung, terkadang juga mereka mendapat bantuan dari tetangga yang memberikan secercah rupiah bagi mereka dan iuran masyarakat setempat. Pihak kelurahan juga sudah melakukan berbagai upaya untuk menolong para Penyandang Disabilitas ini dengan bantuan langsung secara Tunai, namun tidak secara berkala.

Para Penyandang Disabilitas ini tentu saja sangatlah membutuhkan bantuan orang terdekatnya untuk mengakses dan memanfaatkan BPJS Kesehatan yang ada. Karena terdapat kurangnya wawasan dan belum adanya pendampingan dari pekerja sosial, maka perlu diadakannya pendampingan dari pekerja sosial dan pengembangan kapasitas bagi keluarga dari Penyandang Disabilitas dalam mengakses dan memanfaatkan BPJS Kesehatan.

2.1.2 Tinjauan Konsep

1) Jaminan Sosial

Jaminan sosial merupakan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang–Undang Dasar 1945 pasal 28 H bahwa: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat “.

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, maka

kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Setiap negara mengakui bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.

Berdasarkan beberapa faktor di atas, pemerintah melahirkan atau membuat Program Jaminan Kesehatan untuk masyarakat miskin yang dikenal dengan istilah Jamkesmas. Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dan diselenggarakan secara nasional, agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh bagi masyarakat miskin, sehingga masyarakat miskin juga dapat merasakan pelayanan kesehatan ketika mengalami sakit. Tujuan Jamkesmas adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh warga miskin dan tidak mampu agar tercapai derajad kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

Implementasi program JKN pada awal pelaksanaannya mengalami beberapa kendala seperti belum semua penduduk tercakup menjadi peserta, distribusi pelayanan kesehatan yang belum merata, kualitas pelayanan kesehatan yang bervariasi, sistem rujukan serta pembayaran yang belum optimal. Ketidakmerataan ketersediaan fasilitas kesehatan dan kondisi geografis yang sangat bervariasi, menimbulkan potensi melebarnya ketidakadilan kesehatan antara kelompok masyarakat (DJSN, 2012).

2) Pengertian BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan adalah badan publik yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. BPJS Kesehatan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI atau POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia.

3) Tujuan BPJS Kesehatan

Secara umum, tujuan dari adanya BPJS Kesehatan adalah menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi publik dan menjamin agar seluruh peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar

kesehatan.

4) Dasar Hukum BPJS Kesehatan

Dasar hukum dari BPJS Kesehatan diantaranya adalah :

1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
4. Pedoman Umum *Good Governance* BPJS Kesehatan
5. *Manual Board* BPJS Kesehatan
6. Kode Etik BPJS Kesehatan.

5) Persyaratan BPJS Kesehatan

Dilansir dari situs resmi BPJS Kesehatan bahwa persyaratan yang harus disiapkan untuk memperoleh pelayanan program BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) serta Kartu Tanda Penduduk (KTP)sebanyak satu lembar
2. Foto Copy Akta Kelahiran
3. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 buah
4. Foto Copy buku rekening Bank (BRI, BNI, Mandiri, BTN)
5. Surat keterangan dari Sekolah atau Perguruan Tinggi (apabila menempuh pendidikan).

6) Manfaat Program BPJS Kesehatan

Berdasarkan sumber dari BPJS Kesehatan terdapat beberapa manfaat dariadanya program BPJS Kesehatan, yaitu:

a. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang diberikan oleh:
    1. Puskesmas atau yang setara Praktik Mandiri Dokter
    2. Praktik Mandiri Dokter Gigi
    3. Klinik pertama atau yang setara termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama milik TNI/Polri
    4. Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara faskes penunjang: Apotik dan Laboratorium
    5. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)
    6. Pelayanan promosi kesehatan dan pencegahan (promotif preventif)

7. Penyuluhan kesehatan perorangan;
8. Imunisasi rutin
9. Keluarga Berencana meliputi konseling dan pelayanan kontrasepsi, termasuk vasektomi dan tubektomi bekerja sama dengan BKKBN
10. Skrining riwayat kesehatan dan pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu, yang diberikan untuk mendeteksi risiko penyakit dengan metode tertentu atau untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan risiko penyakit tertentu
11. Peningkatan kesehatan bagi peserta penderita penyakit kronis

b. Pelayanan kuratif dan rehabilitatif (pengobatan) mencakup:

1. Adminitrasi pelayanan
2. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis.
3. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun nonoperatif
4. Pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai
5. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama

7) Tata Cara Pengajuan Program BPJS Kesehatan

Berikut alur tahapan pengajuan BPJS Mandiri secara langsung:

1. Calon peserta mendaftar secara perorangan di kantor BPJS Kesehatan terdekat
2. Mengisi formulir pendaftaran untuk memilih kelas BPJS dan jugafaskes tingat 1, untuk peserta BPJS Kesehatan mandiri, sebaiknya memilih kelas 1 dan 2 3.
3. Serahkan formulir dan berkas yang telah diisi ke petugas untuk pemeriksaan kelengkapan serta mengambil nomor antrian.
4. Setelah itu, calon peserta akan mendapat nomor virtual account beserta besaran iuran yang harus dibayar.
5. Peserta yang telah menerima virtual account harus melakukan pembayaran iuran pertama. Pembayaran iuran pertama paling cepat setelah 14 hari setelah penerimaan virtual account dan paling lambat sampai 30 hari.
6. Setelah melakukan pembayaran, jangan lupa simpan bukti pembayaran.
7. Calon peserta menuju ke kantor BPJS tempat pendaftaran

untuk mencetak kartu BPJS Kesehatan.

Kemudian selain dapat melakukan pengajuan program BPJS secara langsung, dapat pula dilakukan pengajuan secara online melalui website www.BPJSKesehatan.go.id dengan tahapan sebagai berikut :

1. Buka situs resmi BPJS, pilih bagian layanan dan pendaftaran online yang tampil di halaman utama.
2. Klik tombol pendaftaran untuk melanjutkan proses pendaftaran.
3. Lengkapi formulir pendaftaran dengan melengkapi nomor KK, nomor ponsel, nomor NPWP, serta alamat peserta.
4. Pilih fasilitas kesehatan BPJS yang diinginkan.
5. Upload foto peserta dengan maksimal ukuran 50 kb.
6. Klik tombolselanjutnyadan lengkapi formulir isian berupa data anggota keluarga, kelas perawatan, nomor rekening, dan alamat email.
7. Kirim formulir tersebut dengan mengklik tombol kirim email.
8. Lakukan aktivasi nomor virtual account akan dikirim ke email peserta.
9. Lakukan pembayaran melalui teller atau ATM yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan simpan bukti pembayarannya.
10. Setelah pembayaran, peserta dapat mencetak e-ID secara mandiri dan mengambil kartu BPJS Kesehatan di kantor BPJS terdekat.

2.1.3 Asesmen

Asesmen merupakan tahap pengumpulan dan analisis data untuk memahami masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima layanan. Dalam hal ini praktikan, melakukan proses penelusuran melalui pengumpulan data dan informasi secara primer dengan melakukan wawancara kepada narasumber terkait Tidak Maksimalnya Pemanfaatan BPJS Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas di Kelurahan Cicaheum. Berikut adalah hasil asesmen yang sudah dilakukan oleh praktikan.

a. Identifikasi Masalah

Kelurahan Cicaheum merupakan salah satu dari Kelurahan yang terdapat di Kota bandung dan bertempat di dalam wilayah Kecamatan Kiaracondong. Merupakan daerah yang berada di tengah perkotaan dengan memiliki zona yang padat dan menjadi salah satu pusat perekonomian di Kota Bandung. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya

fasilitas yang terdapat di Kelurahan Cicaheum. Dengan luas wilayah 167,67 km2 dikatakan memiliki lokasi yang sangat strategis, Kelurahan Cicaheum memiliki 12 RW dengan 77 RT yang masing-masing memiliki berbagai karateristik dan potensi wilayah yang berbeda. Kelurahan Cicaheum merupakan pusat wilayah yang cukup ramai dengan memiliki terminal yang cukup besar sebagai lokasi transit kendaraan umum dari berbagai daerah.

Berdasarkan data jumlah penduduk Kelurahan Cicaheum pada tahun 2022, jumlah penduduk Kelurahan Cicaheum kini mencapai 17.418 jiwa dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 8.838 jiwa dan penduduk laki-laki sebanyak 8.580 jiwa. Diantara jumlah penduduk tersebut, terdapat 26 Penyandang Disabilitas di Kelurahan Cicaheum yang keluarganya membutuhkan bantuan dalam mengakses dan memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara praktikan dengan masyarakat Kelurahan Cicaheum, para Penyandang Disabilitas ini belum mendapatkan layanan BPJS Kesehatan secara maksimal dikarenakan pengetahuan dan wawasan yang kurang dari keluarga Penyandang Disabilitas dalam mengakses dan memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan. Kemudian, belum terdapat pekerja sosial yang mendampingi keluarga Penyandang Disabilitas sehingga menambah kemungkinan para Penyandang Disabilitas tidak maksimal dalam menerima layanan BPJS Kesehatan.

Berdasarkan hasil asesmen dapat disimpulkan beberapa permasalahannya adalah sebagai berikut:

1) Keluarga Penyandang Disabilitas Kesulitan dalam Mengakses BPJS Kesehatan

Dalam mengakses bantuan yang diberikan pemerintah tentunya peserta bantuan atau pihak yang menerima bantuan harus mengetahui dan memahami bagaimana teknis dari pengambilan bantuan tersebut. Kurangnya pengetahuan dan wawasan dari keluarga Penyandang Disabilitas di Kelurahan Cicaheum dalam mengakses dan memanfaatkan BPJS Kesehatan tentunya menghambat proses pemberian bantuan bagi para Penyandang Disabilitas.

2) Belum Terdapatnya Pendampingan dari Pekerja Sosial bagi Penyandang Disabilitas

Kurangnya literasi dan sosialisasi yang terjadi pada keluarga Penyandang Disabilitas di Kelurahan Cicaheum mengakibatkan mereka tidak mengakses dan memanfaatkan BPJS Kesehatan yang ada sehingga perlu adanya campur tangan pekerja sosial sebagai fasilitator dan edukator bagi keluarga Penyandang Disabilitas dalam

mengakses dan memanfaatkan BPJS Kesehatan.

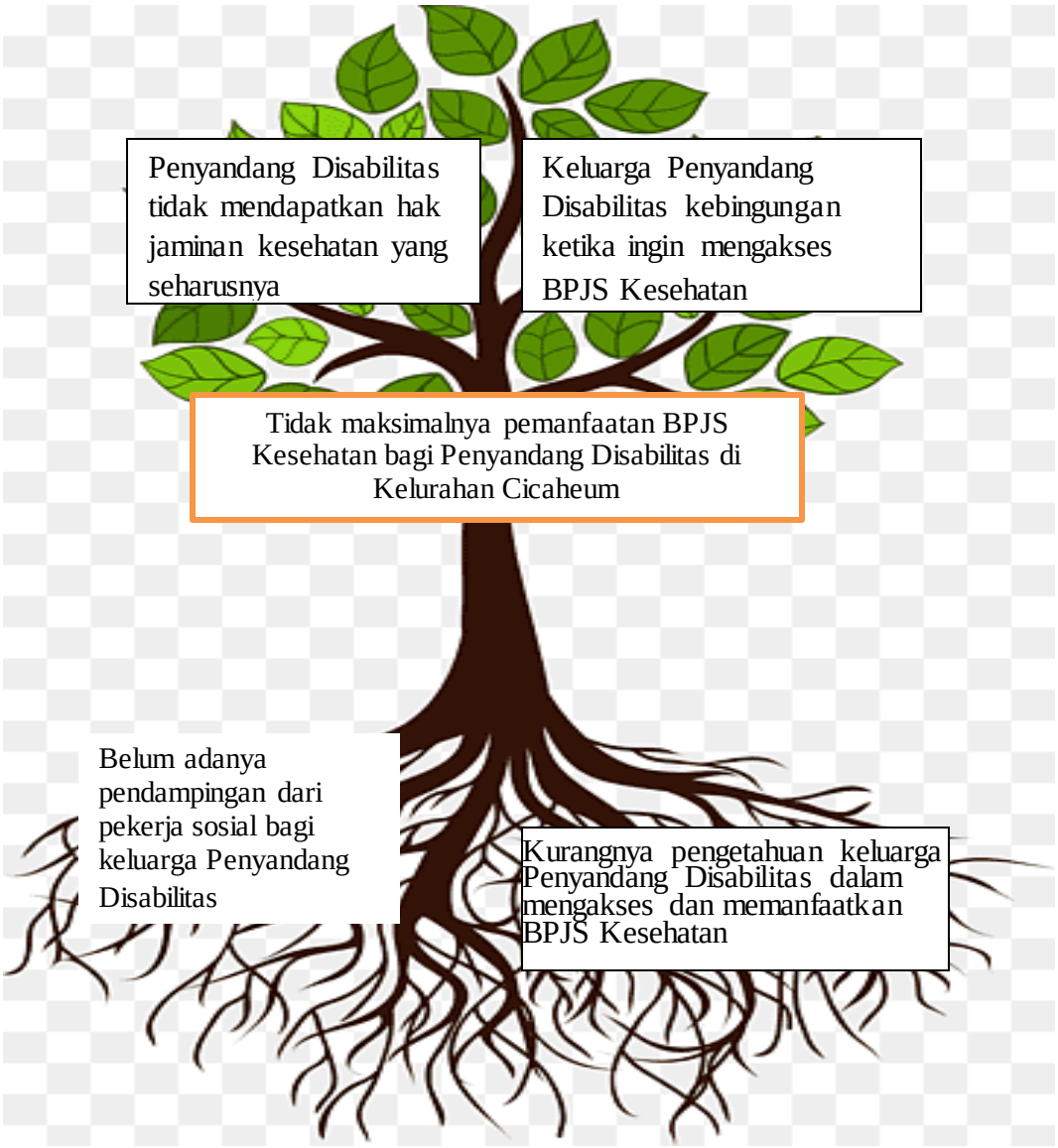

Gambar 2.1 Analisis Pohon Masalah Jaminan Sosial

b. Fokus Masalah

Dari Latar Belakang permasalahan yang ada, praktikan mengambil fokus masalah yaitu Tidak maksimalnya pemanfaatan BPJS Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas di Kelurahan Cicaheum.

c. Penyebab Masalah

Dari hasil Analisis Pohon Masalah, maka dapat disimpulkan beberapapenyebab masalahnya sebagai berikut :

1) Kurangnya pengetahuan keluarga Penyandang Disabilitas dalam mengakses dan memanfaatkan BPJS Kesehatan

   Dalam hal ini tentu perlu dipahami dan diketahui secara baik mengenai bagaimana cara mengakses dan memanfaatkan BPJS Kesehatan oleh keluarga Penyandang Disabilitas, namun karena kesibukan dan kemauan untuk mencari tahu yang rendah, mereka lebih memilih untuk mengandalkan bantuan dari RT, RW, dan tetangga sekitar.

2) Belum Terdapat Pendampingan dari Pekerja Sosial bagi Keluarga Penyandang Disabilitas

   Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kelurahan Cicaheum, memang belum terdapat pekerja sosial yang bertugas di wilayah Kelurahan Cicaheum, sedangkan peran pekerja sosial disini sebagai fasilitator dan edukator sangat penting bagi keluarga atau wali dari Penyandang Disabilitas.

d. Dampak Masalah

Dari hasil Analisis Pohon Masalah, maka dapat disimpulkan beberapadampak masalahnya sebagai berikut :

1) Keluarga Penyandang Disabilitas Kebingungan Ketika Ingin Mengakses BPJS Kesehatan

   Dari hasil wawancara dengan pihak Kelurahan, keluarga dari Penyandang Disabilitas masih banyak yang kebingungan ketika ingin mengakses dan memanfaatkan BPJS Kesehatan, mereka juga malu untuk datang ke kantor kelurahan sehingga Penyandang Disabilitas tidak mendapatkan pelayanan yang seharusnya.

2) Penyandang Disabilitas Tidak Mendapatkan Hak Jaminan Kesehatan yang Seharusnya

   Dikarenakan faktor kurangnya pengetahuan keluarga dari Penyandang Disabilitas mengenai cara mengakses dan memanfaatkan BPJS Kesehatan, para Penyandang Disabilitas ini tentunya tidak mendapatkan hak pelayanan BPJS Kesehatan secara maksimal.

e. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan fokus masalah, identifikasi kebutuhan yang diperlukan sesuai permasalahan yang ada adalah:

1) Meningkatkan Pemahaman tentang cara mengakses BPJS Kesehatan bagi keluarga dari Penyandang Disabilitas
2) Memberikan pendampingan kepada keluarga dari Penyandang Disabilitas
3) Meningkatkan Inisiasi Kelurahan Cicaheum tentang Pentingnya Pelayanan Khusus terhadap Penyandang Disabilitas

f. Potensi dan Sumber

Potensi yang terdapat di sekitar Kelurahan Cicaheum yang dapat dimanfaatkan adalah:

1) BPJS Kesehatan
2) Puskesmas
3) Kekompakan masyarakat Kelurahan Cicaheum

2.1.4 Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Penanganan Kesehatan Penyandang Disabilitas merupakan tugas dan tanggung jawab Menteri Kesehatan. Tanggung jawab tersebut dapat berupa Jaminan. Jaminan Kesehatan adalah adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Jaminan Kesehatan Nasional dipergunakan untuk menjamin Kesehatan dalam mengakses fasilitas Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas, sehingga Penyandang Disabilitas juga mendapat hak dalam Jaminan Kesehatan, namun sering kali dalam pelaksanaannya banyak Penyandang Disabilitas tidak mendapatkan Hak Jaminan Kesehatan tersebut karena faktor kurangnya pengetahuan keluarga dari Penyandang Disabilitas dalam mengakses dan memanfaatkan BPJS Kesehatan.

b. Nama Program

1) Peningkatan Pengetahuan tentang cara mengakses dan memanfaatkan BPJS Kesehatan bagi keluarga Penyandang Disabilitas.
2) Pendampingan bagi keluarga Penyandang Disabilitas oleh pekerja sosial.

c. Sasaran Program

Sasaran intervensi yang ditetapkan oleh praktikan adalah keluarga dari Penyandang Disabilitas.

d. Tujuan Umum dan Khusus

1) Tujuan Umum

Tujuan umum dari Program ini adalah untuk Meningkatkan Pemahaman keluarga dari Penyandang Disabilitas mengenai BPJS Kesehatan, fungsi dari kartu BPJS Kesehatan, dan bagaimana cara mengakses dan memanfaatkan BPJS Kesehatan terhadap Penyandang Disabilitas.

2) Tujuan Khusus

a. Meningkatkan Pemahaman orang tua dan wali dari Penyandang Disabilitas tentang BPJS Kesehatan

b. Meningkatkan Pemahaman orang tua dan wali dari Penyandang Disabilitas tentang cara mengklaim BPJS Kesehatan

c. Meningkatkan tentang Inisiasi mengenai Pentingnya Pendampingan Khusus terhadap keluarga dari Penyandang Disabilitas

e. Bentuk Kegiatan

Dalam Program yang akan dilaksanakan, ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan, antara lain:

1) Sosialisasi tentang BPJS Kesehatan

Dalam buku Dasar-Dasar Sosialisasi (2004) karya Sutaryo, sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang. Serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Dalam kegiatan ini tujuan dilaksanakannya Sosialisasi adalah agar keluarga dari Penyandang Disabilitas mengetahui cara mengakses dan memanfaatkan BPJS Kesehatan.

2) Pendampingan Pekerja Sosial tentang BPJS Kesehatan

Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk membantu klien dengan memberikan edukasi, informasi, dan bimbingan kepada masyarakat untuk dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Dalam kegiatan ini tujuannya untuk membantu membimbing keluarga atau wali dari Penyandang Disabilitas agar mampu mengakses dan memanfaatkan BPJS

Kesehatan Sistem Partisipasi

f. Sistem Partisipan

Sistem partisipan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sistem Partisipan Analisis Jaminan Sosial

No.	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	*Initiator System*	Pekerja Sosial
2.	*Change Agent System*	Pekerja Sosial
3.	*Client System*	Keluarga dari Penyandang Disabilitas
4.	*Support System*	1. Kelurahan Cicaheum 2. Puskesmas
5.	*Controlling System*	Pekerja Sosial
6.	*Implementing System*	1. Pekerja Sosial 2. BPJS Kesehatan 3. Kelurahan Cicaheum
7.	*Target System*	Keluarga dari Penyandang Disabilitas
8.	*Action System*	1. Pekerja Sosial 2. Pekerja Sosial Masyarakat

g. Metode dan Teknik

Metode yang digunakan praktikan selama melaksanakan proses intervensi terhadap permasalahan yang ada adalah Pengembangan Masyarakat (Community Development/CO)/Pengambangan Organisasi (Community Organization/CD). Pengembangan Masyarakat (Community Development/CO) /Pengambangan Organisasi (Community Oraganization/CD) adalah suatu proses untuk memelihara keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan sosial dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial dari suatu masyarakat tertentu atau suatu bidang kegiatan tertentu.

Untuk Teknik yang digunakan praktikan yaitu penyuluhan sosial. Penyuluhan Sosial adalah kegiatan yang dimaksudkan sebagai gerak dasar dan awal untuk bisa lebih memberikan kesiapan dan manfaat program bagi warga sasaran yang ditandai dengan adanya peningkatan pengetahuan, kepercayaan dan keyakinan akan perubahan serta kesadaran dari warga sasaran agar memiliki rasa tanggung jawab penuh dalam diri sendiri.

h. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang dibutuhkan

Program tersebut dapat terlaksana dengan anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rencana Anggaran Biaya Analisis Jaminan Sosial

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Logistik				
	ATK	2	Paket	100.000,00	200.000,00
	Sound System	2	Unit	150.000,00	300.000,00
	Banner kegiatan Sosialisasi (2x3 m)	1	Lembar	75.000,00	75.000,00
	Doorprize	5	Unit	30.000,00	150.000,00
Jumlah I					750.000,00
2.	Honorarium				
	BPJS Kesehatan	2	Orang/Jam	1.000.000,00	2.000.000,00
Jumlah II					2.000.000,00
3.	Konsumsi				
	Snack peserta	30	Box	10.000,00	300.000,00
	Snack panitia	8	Box	10.000,00	80.000,00
	Snack narasumber	2	Box	10.000,00	20.000,00
Jumlah III					500.000,00
Jumlah Keseluruhan					3.150.000,00

i. Analisis Kelayakan Program

Program ini layak digunakan berdasarkan analisis SWOT sebagai berikut:

Tabel 2.3 SWOT Analisis Jaminan Sosial

	Strength : 1. Adanya Narasumber yang tepat 2. Kegiatan didukung oleh masyarakat dan pemerintah daerah	**Weakness :** 1. Ada kemungkinan peserta tidak memahami materi yang disampaikan
Opportunities : 1. Dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas 2. Meningkatkan pengetahuan orang tua dan wali dari Penyandang Disabilitas	**Strategi SO :** 1. Melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah 2. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas	**Strategi WO :** 1. Penyampaian Sosialisasi yang menarik dan menggunakan komunikasi dua arah 2. Penyampaian Sosialisasi dengan Bahasa yang mudah dipahami
Threats : 1. Peserta tidak datang mengikuti kegiatan 2. Peserta mengantuk saat pemaparan materi	**Strategi ST :** 1. Membuat *doorprize* dalam kegiatan 2. Mengadakan *ice breaking*	**Strategi WT :** 1. Meningkatkan Intensitas pembinaan secara langsung kepada Keluarga Penyandang Disabilitas 2. Melakukan Moneva

j. Jadwal dan Langkah-langkah

Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dalam Peningkatan Pengetahuan tentang cara mengakses dan memanfaatkan BPJS Kesehatan bagi keluarga Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahapan pertama dalam pelaksanaan program yang bertujuan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program. Tahap persiapan terdapat kegiatan sebagai berikut:

a) Membentuk panitia kegiatan. Pembentukan panitia kegiatan dilakukan dengan mengumpulkan sumber daya manusia yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan program. Sumber daya manusia yang dilibatkan merupakan perwakilan dari semua unsur yang terlibat. Tahap persiapan bertujuan untuk membentuk koordinasi diantara sumber daya manusia yang

terlibat.

b) Menyusun rancangan kegiatan program. Pada kegiatan penyusunan rancangan kegiatan ini akan dilakukan kegiatan *brainstorming* diantara semua panitia kegiatan mengenai pelaksanaan bentuk kegiatan, pengisi kegiatan, alat dan bahan yang diperlukan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan tempat pelaksanaan kegiatan. Rancangan kegiatan dibuat sedetail mungkin untuk memudahkan dalam penyusunan proposal kegiatan.

c) Menyusun proposal kegiatan. Penyusunan proposal ini dilakukan dengan melibatkan semua panitia kegiatan. Penyusunan proposal kegiatan ini ditujukan untuk memudahkan dalam upaya memperoleh izin pelaksanaan program, ditujukan dalam upaya mencapai program pemerintah yang sesuai, dan ditujukan untuk memperoleh persetujuan dengan narasumber.

d) Mempersiapkan kebutuhan alat dan bahan kegiatan. Kegiatan persiapan kebutuhan alat dan bahan merupakan kegiatan pengumpulan alat dan bahan yang sudah direncanakan sebelumnya. Panitia melakukan pengecekan terkait kecukupan alat dan bahan yang diperlukan sesuai perencanaan.

e) Melakukan *briefing*. Kegiatan *briefing* ini diperlukan untuk memastikan koordinasi terakhir sebelum program dilaksanakan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan program. Kegiatan ini akan dipimpin oleh ketua panitia dan diikuti oleh semua panitia.

2) Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan Peningkatan Pengetahuan tentang cara mengakses dan memanfaatkan BPJS Kesehatan bagi keluarga Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut:

a) Sosialisasi tentang BPJS Kesehatan

Dalam kegiatan ini tujuan dilaksanakannya Sosialisasi adalah agar keluarga dari Penyandang Disabilitas mengetahui cara mengakses dan memanfaatkan BPJS Kesehatan. Dalam kegiatan ini akan melibatkan Pemerintah Daerah Kota Bandung, juga pihak BPJS Kesehatan sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut. Kegiatan ini akan dimulai dengan kegiatan pemaparan mengenai pengertian mengenai BPJS Kesehatan hingga bagaimana cara mengakses dan memanfaatkan layanan-layanan yang ada di BPJS Kesehatan.

b) Pendampingan Pekerja Sosial tentang BPJS Kesehatan

Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk membantu klien dengan memberikan edukasi, informasi, dan bimbingan kepada masyarakat untuk dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Dalam kegiatan ini tujuannya untuk membantu membimbing keluarga atau wali dari Penyandang Disabilitas agar mampu mengakses dan memanfaatkan BPJS Kesehatan.

Tabel 2.4 Susunan Acara Sosialisasi BPJS Kesehatan

Kegiatan	**Waktu**	**Durasi**	**Tempat**	**PIC**
Persiapan Kegiatan	07.30 – 08.00	30’	Aula Kelurahan Cicaheum	Panitia
Registrasi Peserta	08.00 – 08.30	30’		Panitia
Pembukaan	08.30 – 08.45	15’		MC
Sambutan	08.45 – 09.00	15’		Perwakilan Pemerintah Daerah
Pembacaan Do’a	09.00 – 09.10	10’		Panitia
Pemaparan materi mengenai Peningkatan Pengetahuan tentang cara mengakses dan memanfaatkan BPJS Kesehatan bagi keluarga Penyandang Disabilitas	09.10 – 10.40	90’		BPJS Kesehatan
Tanya Jawab	10.40 – 11.00	20’		Peserta
Dokumentasi	11.00 – 11.15	15’		Panitia
Penutupan	11.15 – 11.20	5’		MC

2.2 Profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial

2.2.1 Gambaran Umum

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya-upaya nyata agar kesamaan dan kesetaraan dengan warga Negara Indonesia lainnya dapat terwujud, terpadu dan berkesinambungan pada akhirnya akan menciptakan kemandirian dan kesejahteraan hidup bagi seluruh masyarakat. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan kesejahteraan sosial adalah dengan membentuk Program Keluarga Harapan atau yang biasa disingkat dengan PKH. Dalam istilah internasional, PKH dikenal dengan nama Cash Conditional Transfer atau CCT.

PKH merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada Keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu di mana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, Keluarga Miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Bantuan sosial PKH pada tahun 2019 terbagi menjadi dua jenis yaitu Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen yang diberikan berdasarkan ketentuan tertentu. Bantuan ini berbentuk uang yang tujuannya agar mampu dimanfaatkan Keluarga Miskin dengan sebagaimana mestinya, namun fakta yang sering dijumpai di lapangan, terutama di Kelurahan Cicaheum, masih banyak penyalahgunaan dana atau bantuan Tunai PKH kepada sesuatu hal yang tidak semestinya, seperti membeli barang tersier. Praktikan merasa

tertarik untuk mengangkat isu "Belum Maksimalnya Pemanfaatan Bantuan Tunai PKH pada Keluarga Miskin di Kelurahan Cicaheum".

2.2.2 Tinjauan Konsep

1. Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah merupakan bantuan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bansos dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Dinas bansos bisa "dengan syarat" atau "tanpa syarat", diberikan melalui Kementerian/Lembaga, serta untuk bencana alam. Dari segi durasinya, Bansos dapat bersifat sementara (untuk korban bencana), atau tetap (penyandang cacat), dan dapat berupa uang atau barang.

Menurut Perpres No 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

2. Program Keluarga Harapan

Merupakan salah satu program dari Bantuan Sosial dengan kepesertaan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang utamanya ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan miskin dengan tujuan mereka memiliki akses dan mampu memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya.

Bantuan PKH terbagi menjadi dua jenis, yaitu Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Bantuan Tetap untuk Setiap Keluarga

a. Reguler : 550.000,- / keluarga / tahun
b. PKH AKSES : 1.000.000,- /keluarga / tahun

Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga PKH

a. Ibu hamil : 2.400.000,-
b. Anak usia dini : 2.400.000,-
c. SD : 900.000,-
d. SMP : 1.500.000,-
e. SMA : 2.000.000,-
f. Disabilitas berat : 2.400.000,-

g. Lanjut usia : 2.400.000,-

2.2.3 Asesmen

Asesmen merupakan tahap pengumpulan dan analisis data untuk memahami masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima layanan. Dalam hal ini praktikan, melakukan proses penelusuran melalui pengumpulan data dan informasi secara primer dengan melakukan wawancara kepada pihak Kelurahan dan RW terkait Belum Maksimalnya Pemanfaatan Bantuan Tunai PKH pada Keluarga Miskin di Kelurahan Cicaheum. Mereka mengatakan memang dalam penggunaan Bantuan Tunai PKH masyarakat Keluarga Miskin masih belum pada peruntukkannya. Hal ini juga ditambah dengan kurangnya peran pihak RT, RW, dan Kelurahan dalam mengawasi penggunaan Bantuan Tunai PKH.

Salah satu RW juga mengatakan bahwa ia tidak mengambil pusing ketika salah satu penerima bantuan Tunai PKH tidak menggunakan uang sesuai untuk peruntukkannya, asal keluarganya hidup sejahtera dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentu kebijakan tersebut memang mulia, namun yang menjadi masalah adalah ketika uang tersebut digunakan untuk membeli keperluan yang menyangkut gaya hidup Keluarga Miskin, dan hal tersebut terjadi pada salah satu Keluarga Miskin di Kelurahan Cicaheum.

a. Identifikasi Masalah

Kelurahan Cicaheum merupakan salah satu dari Kelurahan yang terdapat di Kota bandung dan bertempat di dalam wilayah Kecamatan Kiaracondong. Merupakan daerah yang berada di tengah perkotaan dengan memiliki zona yang padat dan menjadi salah satu pusat perekonomian di Kota Bandung. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya fasilitas yang terdapat di Kelurahan Cicaheum. Dengan luas wilayah 167,67 km2 dikatakan memiliki lokasi yang sangat strategis, Kelurahan Cicaheum memiliki 12 RW dengan 77 RT yang masing-masing memiliki berbagai karateristik dan potensi wilayah yang berbeda. Kelurahan Cicaheum merupakan pusat wilayah yang cukup ramai dengan memiliki terminal yang cukup besar sebagai lokasi transit kendaraan umum dari berbagai daerah.

Berdasarkan data jumlah penduduk Kelurahan Cicaheum pada tahun 2022, jumlah penduduk Kelurahan Cicaheum kini mencapai 17.418 jiwa dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 8.838 jiwa dan penduduk laki-laki sebanyak 8.580 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang cukup padat di wilayah Kelurahan Cicaheum, tentunya tidak terlepas dari permasalahan kemiskinan yang ada. Berdasarkan wawancara praktikan dengan pihak kelurahan dan masyarakat setempat, kebanyakan dari masyarakat

yang mengalami masalah kemiskinan merupakan masyarakat pendatang dari luar Kota Bandung. Hal ini juga ditambah dengan adanya terminal bus di Cicaheum yang meningkatkan tingkat mobilitas masyarakat Indonesia dari satu kota ke kota lainnya.

Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan ini salah satunya adalah dengan melaksanakan Program Keluarga Harapan. Program ini tentu sangat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan ekonominya dengan pemberian sejumlah uang dengan peruntukkannya sendiri-sendiri, namun kenyataan di lapangan sangat berbeda, bantuan Tunai PKH ini justru digunakan untuk sesuatu yang tidak seharusnya seperti membeli barang tersier. Kemudian, belum adanya pengawasan secara ketat dari pihak Kelurahan Cicaheum mengakibatkan bantuan Tunai PKH ini seakan-akan bebas digunakan bagi para penerimanya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukannya penyadaran masyarakat mengenai peruntukkan bantuan Tunai PKH yang seharusnya dan perlu dilakukannya pengawasan dari pihak RT, RW, dan Kelurahan Cicaheum.

Berdasarkan hasil asesmen tersebut dapat disimpulkan beberapa permasalahan, yaitu:

a. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pemanfaatan bantuan Tunai PKH yang Seharusnya
b. Belum terdapat pengawasan secara ketat oleh pihak Kelurahan Cicaheum

Kemudian praktikan menggunakan analisis pohon masalah sebagai alat untuk mengidentifikasi masalah yang ada.

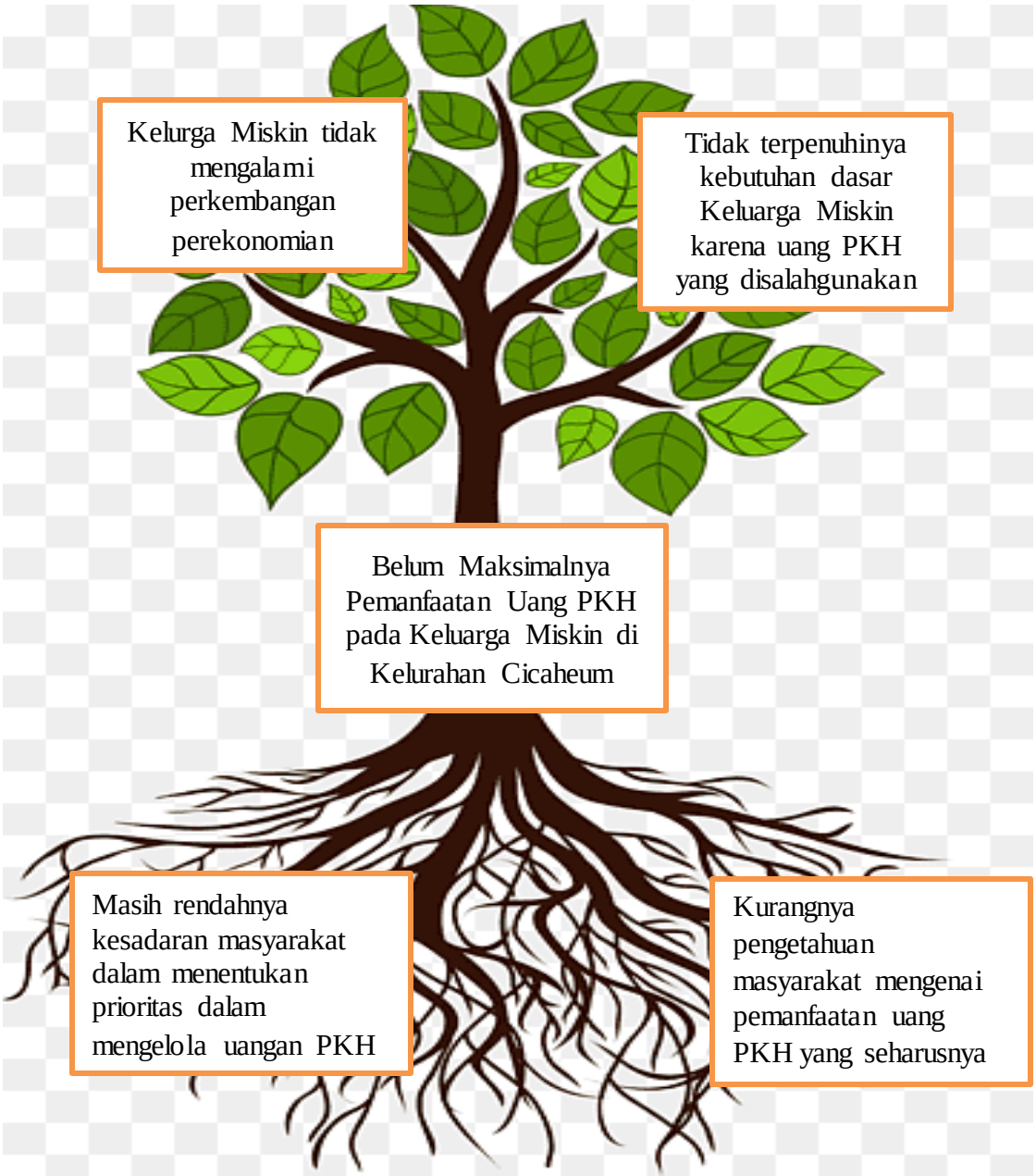

Gambar 2.2 : Analisis Pohon Masalah Analisis Bantuan Sosial

b. Penyebab Masalah

Berdasarkan hasil analisis Pohon Masalah, dapat disimpulkan beberapa penyebab masalahnya sebagai berikut:

a. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Mengenai Pemanfaatan Bantuan Tunai PKH yang Seharusnya.
   Berdasarkan hasil wawancara praktikan dengan warga Kelurahan Cicaheum, masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa mereka bebas untuk menggunakan uang yang diberikan pemerintah berdasarkan kemauan mereka sehingga bantuan Tunai PKH tidak dimanfaatkan pada sesuatu yang seharusnya.
b. Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Menentukan Prioritas dalam Mengelola Bantuan Tunai PKH.
   Berdasarkan hasil wawancara praktikan dengan warga Kelurahan Cicaheum, beberapa masyarakat menggunakan bantuan Tunai PKH untuk sesuatu yang tidak seharusnya seperti membeli barang tersier atau untuk membayar sewa kontrakan.

c. Dampak Masalah

Dari hasil analisis Pohon Masalah, maka dapat disimpulkan beberapa dampak masalahnya sebagai berikut :

a. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar Keluarga Miskin karena bantuan Tunai PKH yang disalahgunakan
   Penyalahgunaan bantuan Tunai PKH sangat berdampak kepada pemenuhan kebutuhan dasar Keluarga Miskin karena setiap dari jumlah uang yang diberikan sudah ada peruntukannya masing-masing.
b. Kelurga Miskin tidak mengalami perkembangan perekonomian
   Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan bantuan Tunai PKH berdampak cukup parah bagi Keluarga Miskin dengan tidak berkembangnya perekonomian mereka, sedangkan PKH dibentuk untuk menangani permasalahan kemiskinan, akan tetapi karena permasalahan itu justru menjadi ‘bumerang’ bagi mereka.

d. Fokus Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, yang menjadi fokus permasalahan adalah Belum Maksimalnya Pemanfaatan Bantuan Tunai PKH pada Keluarga Miskin di Kelurahan Cicaheum.

e. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan fokus masalah, identifikasi kebutuhan yang diperlukan sesuai permasalahan yang ada di wilayah Kelurahan Cicaheum adalah:

a. Sosialisaasi kepada Keluarga Miskin terkait pemanfaatan bantuan Tunai PKH
b. Kolaborasi dengan pihak Kelurahan Cicaheum untuk senantiasa mengawasi penggunaan bantuan Tunai PKH

f. Potensi dan Sumber

Potensi dan sumber yang berada di wilayah Kelurahan Cicaheum adalah:

a. Pengurus RT dan RW di Kelurahan Cicaheum
b. Pemerintah daerah Kota Bandung
c. Kelurahan Cicaheum

2.2.3 Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Dari hasil asesmen, praktikan merancang program untuk mengatasi permasalahan tentang Belum Maksimalnya Pemanfaatan Bantuan Tunai PKH pada Keluarga Miskin di Kelurahan Cicaheum.

Bantuan Sosial berupa Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program dari pemerintah pusat untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat. Namun, realita memang selalu tidak berjalan sesuai dengan rencana, sudah menjadi rahasia umum bahwa bantuan Tunai PKH digunakan atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Akibatnya, Keluarga Miskin yang menyalahhgunakan bantuan Tunai PKH tidak kunjung keluar dari masalah kemiskinan dan dikhawatirkan memperburuk keadaan mereka, oleh karena itu, diperlukan kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Bantuan Tunai PKH bagi Keluarga Miskin dan Pengawasan Penggunaan Bantuan Tunai PKH Dengan Memanfaatkan RT dan RW.

b. Tujuan Umum dan Khusus

Program yang akan dilaksanakan terdiri dari 2 tujuan, yaitu:

a. Tujuan Umum

Program ini dilaksanakan bertujuan untuk membantu menyadarkan Keluarga Miskin untuk senantiasa memanfaatkan bantuan Tunai PKH sesuai dengan peruntukkannya melalui program sosialisasi dan pengawasan oleh pihak yang kompeten.

b. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari Program ini adalah :

1) Memperbaiki pemanfaatan bantuan Tunai PKH agar sesuai dengan peruntukkannya
2) Meningkatkan peran RT dan RW Kelurahan Cicaheum dengan meminta partisipasi mereka dalam pengawasan bantuan Tunai PKH

c. Sasaran Program

Sasaran intervensi yang ditetapkan oleh praktikan adalah :

a. Keluarga Miskin Kelurahan Cicaheum
b. RT dan RW Kelurahan Cicaheum

d. Bentuk Kegiatan

Dalam Program yang akan dilaksanakan, ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan, antara lain:

a. Sosialisasi Pemanfaatan Bantuan Tunai PKH bagi Keluarga Miskin Kelurahan Cicaheum

   Sosialisasi ini dilakukan untuk membantu membuka pengetahuan dan wawasan Keluarga Miskin dalam memanfaatkan bantuan Tunai PKH dengan narasumber yang kompeten di bidang PKH.

b. Pengawasan Penggunaan Bantuan Tunai PKH

   Dalam pengawasan ini, praktikan berencana untuk memanfaatkan sumber daya manusia dari Kelurahan Cicaheum, yaitu RT dan RT selaku pihak yang sering bertemu dengan Keluarga Miskin Kelurahan Cicaheum. RT dan RW ini tentu nantinya akan mendapat pengarahan dari dinas sosial Kota Bandung sebelum bertugas menjadi pengawas.

e. Sistem Partisipan

Sistem partisipan dalam Sosialisasi Pemanfaatan Bantuan Tunai PKH bagi Keluarga Miskin dan Pengawasan Penggunaan Bantuan Tunai PKH Dengan Memanfaatkan RT dan RW, sebagai berikut:

Tabel 2.5 Sistem partisipan Sosialisasi PKH

No.	JENIS SISTEM	SISTEM REPRESENTATIF
1.	Sistem Inisiator	Pekerja Sosial
2.	Sistem Agen Perubahan	1. Pekerja Sosial 2. Dinas Sosial Kota Bandung
3.	Sistem klien	1. Keluarga Miskin Kelurahan Cicaheum 2. Kelurahan Cicaheum
4.	Sistem Support	1. Pemerintah Daerah Kota Bandung 2. Dinas Sosial Kota Bandung 3. Lurah Cicaheum
5.	Sistem Pengontrol	1. Pekerja Sosial 2. Dinas Sosial Kota Bandung
6.	Sistem pelaksanaan	1. Pekerja Sosial 2. Dinas Sosial Kota Bandung
7.	Sistem Sasaran	1. Keluarga Miskin Kelurahan Cicaheum 2. RT dan RW Kelurahan Cicaheum
8.	Sistem Aksi	1. Pekerja Sosial 2. Dinas Sosial Kota Bandung 3. Kelurahan Cicaheum

f. Rencana Anggaran Biaya

Rencana anggaran biata yang akan dikeluarkan dalam Sosialisasi Pemanfaatan Bantuan Tunai PKH bagi Keluarga Miskin dan Pengawasan Penggunaan Bantuan Tunai PKH Dengan Memanfaatkan RT dan RW, sebagai berikut:

Tabel 2.6 RAB Sosialisasi PKH

No	Uraian	Volume		Satuan	Jumlah
Kesekretariatan					
1.	Surat	10	Buah	500	5.000
2.	Amplop	10	Buah	100	10.000
3.	Pengadaan Proposal	3	Buah	15.000	45.000
Sub Total Kesekretariatan					**60.000**
Divisi Konsumsi					
1.	*Snack* box peserta	50	Paket	5000	250.000
2.	*Snack* box panitia	10	Paket	7000	70.000
3.	Makan siang peserta	50	Paket	20.000	1.000.000
4.	Makan siang panitia	10	Paket	20.000	200.000
5.	Makan siang Narasumber	5	Paket	20.000	100.000
Sub Total Divisi Konsumsi					**1.620.000**
Divisi Logistik					
1.	Banner	(3x2 M) 2	Buah	20.000	40.000
Sub Total Divisi Logistik					**40.000**
KegiatanPelatihan(transport)					
1.	Peserta	50	Orang	50.000	2.500.000
2.	Panitia	10	Orang	75.0000	750.000
3.	Narasumber	5	Orang	200.000	1.000.000
Sub Total Kegiatan					**4.250.000**
TOTAL					**6.130.000**

g. Metode dan Teknik

Metode

Metode utama yang digunakan adalah *Community Organization and Community Developmen*t, yaitu agar masyarakat Keluarga Miskin yang mengikuti PKH dalam hal ini penerima Bantuan Sosial, mampu mengelola bantuan Tunai PKH sesuai dengan peruntukkannya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial keluarganya.

Teknik

1) Community Meeting

Community Meeting atau Pertemuan Masyarakat merupakan kegiatan non formal berupa forum musyawarah warga di

tingkat kelurahan yang merupakan wadah untuk melakukan *sounding* mengenai kegiatan yang akan dilakukan mengenai pemanfaatan bantuan Tunai PKH.

2) Penyuluhan Sosial

Penyuluhan Sosial adalah kegiatan yang dimaksudkan sebagai gerak dasar dan awal untuk bisa lebih memberikan kesiapan dan manfaat program bagi warga sasaran yang ditandai dengan adanya peningkatan pengetahuan, kepercayaan dan keyakinan akan perubahan serta kesadaran dari warga sasaran agar memiliki rasa tanggung jawab penuh dalam diri sendiri.

h. Uji Kelayakan Program

Analisis kelayakan dari program Sosialisasi Pemanfaatan Bantuan Tunai PKH bagi Keluarga Miskin dan Pengawasan Penggunaan Bantuan Tunai PKH Dengan Memanfaatkan RT dan RW, yaitu:

Tabel 2.7 SWOT Sosialisasi PKH

	Kekuatan (*Strength*): Melibatkan *stakeholder* terkait	**Kelemahan (*Weakness*):** Anggaran biaya cukup besar
Peluang (*Opportunity*):. 1. Adanya dukungan dari *stakeholder* 2. Narasumber yang kompeten di bidang PKH	**Strategi SO:** 1. Dengan adanya dukungan dari *stakeholder* maka program akan berjalan dengan baik 2. Meningkatkan antusiasme peserta	**Strategi WO:** 1. Menyusun proposal program 2. Menekan anggaran biaya program dengan memanfaatkan barang yang ada
Ancaman (*Threats*): 1. Peserta tidak memahami isi dari pemaparan materi 2. Peserta bosan dengan kegiatan	**Strategi ST:** 1. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami 2. Mengadakan *ice breaking*	**Strategi WT:** Melakukan pengawasan keuangan dan pembukuan yang baik dan benar

i. Jadwal dan Langkah – langkah

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam program ini adalah:

1. Tahap Persiapan

   Merupakan tahapan pertama dalam pelaksanaan program yang bertujuan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program. Tahap persiapan terdapat kegiatan sebagai berikut:

   a) Membentuk panitia kegiatan. Pembentukan panitia kegiatan dilakukan dengan mengumpulkan sumber daya manusia yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan program. Sumber daya manusia yang dilibatkan merupakan perwakilan dari semua unsur yang terlibat. Tahap persiapan bertujuan untuk membentuk koordinasi diantara sumber daya manusia yang terlibat.

   b) Menyusun rancangan kegiatan program. Pada kegiatan

penyusunan rancangan kegiatan ini akan dilakukan kegiatan brain storming diantara semua panitia kegiatan mengenai pelaksanaan bentuk kegiatan, pengisi kegiatan, alat dan bahan yang diperlukan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan tempat pelaksanaan kegiatan. Rancangan kegiatan dibuat sedetail mungkin untuk memudahkan dalam penyusunan proposal kegiatan.

c) Menyusun proposal kegiatan. Penyusunan proposal ini dilakukan dengan melibatkan semua panitia kegiatan. Penyusunan proposal kegiatan ini ditujukan untuk memudahkan dalam upaya memperoleh izin pelaksanaan program, ditujukan dalam upaya mencapai program pemerintah yang sesuai, dan ditujukan untuk memperoleh persetujuan dengan narasumber.
d) Mempersiapkan kebutuhan alat dan bahan kegiatan. Kegiatan persiapan kebutuhan alat dan bahan merupakan kegiatan pengumpulan alat dan bahan yang sudah direncanakan sebelumnya. Panitia melakukan pengecekan terkait kecukupan alat dan bahan yang diperlukan sesuai perencanaan.
e) Melakukan *briefing*. Kegiatan *briefing* ini diperlukan untuk memastikan koordinasi terakhir sebelum program dilaksanakan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan program. Kegiatan ini akan dipimpin oleh ketua panitia dan diikuti oleh semua panitia.

2. Tahap Pelaksanaan

Merupakan tahapan kedua atau tahapan utama dimana program dilaksanakan sesuai dengan rencana program yang telah dirancang. Praktikan mengusulkan untuk membuat Sosialisasi Pemanfaatan Bantuan Tunai PKH bagi Keluarga Miskin dan Pengawasan Penggunaan Bantuan Tunai PKH Dengan Memanfaatkan RT dan RW. Dalam kegiatan ini akan melibatkan beberapa pihak dan *stakeholder*. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung selaku pihak yang kompeten mengenai PKH dan akan dimulai dengan pemaparan pengenalan mengenai PKH, bagaimana sistem PKH ini berjalan, dan mengapa PKH ini penting bagi Keluarga Miskin. Kemudian kegiatan ini akan diakhiri dengan kegiatan pelatihan pemasaran produk yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung.

Tabel 2.8 Susunan acara Sosialisasi PKH

Kegiatan	Waktu	Durasi	Pelaksana
Persiapan Kegiatan	07.30 – 08.00	30’	Panitia
Registrasi Peserta	08.00 – 08.30	30’	Panitia
Pembukaan	08.30 – 08.45	15’	MC
Sambutan	08.45 – 09.00	15’	Perwakilan Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat
Pembacaan Do’a	09.00 – 09.10	10’	Panitia
Pemaparan Materi mengenai Sosialisasi Pemanfaatan Bantuan Tunai PKH dan Pengawasan Penggunaan Bantuan Tunai PKH oleh RT dan RW	09.10 – 11.40	90’	Dinas Sosial Kota Bandung
Tanya Jawab	11.40 – 12.00	20’	Peserta
Istirahat	12.00 – 13.00	60’	Panitia
Dokumentasi	14.30 – 14.45	15’	Panitia
Penutupan	14.45 – 14.50	5’	MC

3. Tahap Pengakhiran

   Tahap pengakhiran merupakan tahapan terakhir dalam rangkaian kegiatan. Kegiatan pada tahap ini meliputi evaluasi kegiatan dan pelaporan kegiatan yang memuat evaluasi dan pelaporan dari kegiatan yang telah berlangsung.

   a) Evaluasi. merupakan kegiatan refleksi atau peninjauan kembali antara proses dengan hasil yang telah dicapai dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam kegiatan evaluasi ini dilakukan

dengan dua bentuk, yakni evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan dalam setiap tahapan kegiatan. Tujuan dilakukannya evaluasi proses adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pencapaian tujuan. Evaluasi hasil merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan diakhir kegiatan atau program. Tujuan dilakukannya evaluasi hasil adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan setelah pelaksanaan program.

b) Pelaporan Program. Pelaporan Program Sosialisasi Pemanfaatan Bantuan Tunai PKH bagi Keluarga Miskin dan Pengawasan Penggunaan Bantuan Tunai PKH Dengan Memanfaatkan RT dan RW merupakan kegiatan penyusunan laporan pertanggung jawaban secara tertulis dari pelaksanaan program kepada pihak yang memiliki otoritas dan yang sudah terlibat dalam pelaksanaan program, yakni Pemerintah Desa, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung. Pelaporan kegiatan ini juga dapat digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan program-program selanjutnya.

2.3 Profil Analis Pemberdayaan Sosial

2.3.1 Gambaran Umum

Permasalahan disuatu daerah menyebabkan terhambatnya suatu mobilitas sosial dan kesejahteraan sosial bagi masyarakatnya termasuk di daerah Kelurahan Cicaheum. Salah satu permasalahan yang di hadapi oleh Kelurahan Cicaheum adalah masalah kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas. Menurut Undang- udang N0.8 Tahun 2016 Tetang Penyandang Disabilitas Pasal 1 Ayat 1, menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dari masa ke masa, persoalan penting yang dihadapi para Penyandang Disabilitas adalah stigma sosial. Stigma adalah ciri fisik dan sosial yang sifatnya negatif dan mengurangi kualitas identitas sosial dan harga diri seorang individu atau kelompok (Goffman, 1963). Stigma dapat muncul dari luar diri (*enacted/ public stigma*), diberikan oleh orang lain pada seorang individu atau kelompok; dan dapat pula muncul dari

dalam diri (*self-stigma*). Anggapan warga masyarakat bahwa kaum disabilitas itu lemah dan tidak berdaya adalah contoh dari *public/enacted stigma*; dan anggapan kaum disabilitas bahwa diri mereka sendiri lemah dan tidak berdaya (padahal tidak demikian) adalah contoh dari self-stigma.

Kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial di Kelurahan Cicaheum belum berjalan dengan baik dan dirasa perlu ditingkatkan kembali untuk peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas baik secara ekonomi maupun sosial. Kegiatan pemberdayaan ekonomi memang belum memberikan dampak yang signifikan pada ekonomi rumah tangga para anggota. Namun, pemberdayaan sosial justru memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan sosial para anggota. Ikatan emosional, komunikasi yang unik antar anggota, berdampak pada terbentuknya kepercayaan diri para anggota. Hal itu mendorong mereka memiliki pemikiran yang terbuka dalam menyikapi kondisi fisiknya dan merespon stigma negatif mengenai Penyandang Disabilitas fisik di masyarakat. Para anggota pun mampu membangun identitas sosial yang lebih kuat di masyarakat yaitu sebagai Penyandang Disabilitas yang berdaya, dan mereka merasa sebagai orang 'normal'.

2.3.2 Tinjauan Konsep

a. Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata "*empowerment*" yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat dengan harapan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai subjek, tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan hidup mereka (Moebyarto dalam Wahyono 2001: 23). Menurut Suharto (2010: 57) dalam bukunya yang berjudul Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat menyatakan pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata "power" (kekuasaan atau keberdayaan), upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang telah dimiliki masyarakat. Jadi pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui sebuah kerja adalah penekanan pada pentingnya masyarakat yang mandiri sebagai satu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan.

Menurut Undang–UndangNomor 14 tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial pemberdayaan sosial adalah upaya yang diarahkan

untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Menurut Edi Suharto (2005: 57), pemberdayaan berasal dari kata dasar "power" yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan "em" pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas.

Sasaran program pemberdayaan masyarakat yang disampaikan oleh Sumaryadi (2005: 115) dalam mencapai kemandirian yaitu sebagai berikut: (a) terbuka kesadaran dan tumbuh peran aktif, mampu mengorganisir dan kemandirian bersama, (b) memperbaiki keadaan sosial kehidupan kaum lemah, tak berdaya, dengan meningkatkan pemahaman, peningkatan pendapatan, dan usaha-usaha kecil di berbagai bidang ekonomi ke arah swadaya. (c) meningkatkan kemampuan kinerja kelompok-kelompok swadaya dalam keterampilan teknis dan manajemen untuk memperbaiki produktifitas dan pendapatan mereka.

Program pemberdayaan yang baik harus mempunyai sasaran program yang jelas dan terarah, sehingga tujuan dari program yang dilakukan dapat tercapai. Sasaran pemberdayaan ditujukan agar meningkatkan kinerja yang nyata sesuai dengan keterampilan yang ada sehingga diperoleh perbaikan dalam produktifitas dan pendapatan kelompok-kelompok swadaya masyarakat.

k. Penyandang Disabilitas

Menurut Undang-udang N0.8 Tahun 2016 Tetang Penyandang Disabilitas Pasal 1 Ayat 1 bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Ada beberapa jenis Penyandang Disabilitas yaitu sebagai berikut:

1) Penyandang Disabilitas fisik
2) Penyandang Disabilitas intelektual
3) Penyandang Disabilitas mental
4) Penyandang Disabilitas sensorik

2.3.3 Asesmen

Kota Bandung adalah kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota ini

memiliki luas wilayah sebesar 167,31 km2 dan dengan jumlah populasi jiwa sebanyak 2.507.888 jiwa. Kota ini memiliki sebutan Kota kembang merupakan sebutan lain untuk kota ini, karena pada zaman dulu kota ini dinilai sangat cantik dengan banyaknya pohon dan bunga-bunga yang tumbuh di sana.

Kota bandung kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat, sekaligus menjadi ibu kota provinsi tersebut. Kota ini terletak 140 km sebelah tenggara Jakarta, dan merupakan kota terbesar di wilayah Pulau Jawa bagian selatan. Kota ini sering dikunjungi dari berbagi orang karena kota kembang ini cukup sejuk untuk dijadikan tempat wisata ataupun tempat pendidikan.

Kelurahan Cicaheum berada pada wilayah dataran rendah dan dekat dengan perkotaan. Sebagian besar lahan digunakan untuk daerah permukiman, serta daerahpertokoan dan industri sehingga Kelurahan Cicaheum merupakan daerah perekonomian yang hidup, di mana aktivitas penduduk terjadi selama 24 jam setiap harinya. Kondisi tersebut didukung oleh kepadatan penduduk dengan jumlah penduduk mencapai 17.418 jiwa dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 8.838 Jiwa dan penduduk laki-laki sebanyak 8.580 jiwa juga penduduk Penyandang Disabilitas sebanyak 26 jiwa dengan jenis yang berbeda.

Dari 26 Penyandang Disabilitas ini, mayoritasnya tidak bekerja dan memilih untuk berdiam diri di rumah. Mereka merasa malu dan tidak percaya diri akan kondisi fisik dan mental mereka, ditambah stigma masyarakat yang menganggap bahwa Penyandang Disabilitas itu tidak dapat bekerja seperti orang normal lainnya. Para Penyandang Disabilitas ini masih bisa diberdayakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing, yang menjadi tantangan untuk memberdayakan mereka adalah memunculkan rasa kemauan untuk berkembang dan sejahtera. Oleh karena itu, praktikan merasa isu mengenai Kurangnya Minat Untuk Berkembang Pada Penyandang Disabilitas di Kelurahan Cicaheum perlu diperhatikan lebih lanjut oleh pihak Kelurahan.

a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil asesmen, dapat disimpulkan beberapa penyebab masalah mengenai Kurangnya Minat Untuk Berkembang Pada Penyandang Disabilitas di Kelurahan Cicaheum, yaitu:

a. Kurangnya Motivasi Untuk Berkembang

Menjadi Penyandang Disabilitas merupakan suatu kondisi yang sulit baik itu untuk penyandangnya atau keluarganya. Mereka

hidup dengan takdir yang berbeda dengan kebanyak orang lainnya, namun dituntut juga untuk bisa menerima perbedaan itu agar bisa berkembang, agar bisa melangkah maju. Karena 'perbedaan' itulah yang menjadikan semangat mereka untuk berkembang menjadi sangat rendah. Diperlukan suatu motivasi dan dukungan, terutama dari keluarga, untuk meningkatkan semangat mereka dalam berkembang membuktikan pada orang lain bahwa mereka mampu.

b. Stigma Negatif Masyarakat

Stigma dari masyarakat memang sudah menjadi hal yang umum, tetapi Penyandang Disabilitas bisa mencegah dari stigma-stigma tersebut. Dengan cara mengembangkan kemandirian, serta menumbuhkan kepercayaan diri. Sebab, individu yang percaya diri memiliki sikap yang positif terhadap dirinya sendiri. Rasa percaya diri itu bisa menumbuhkan keberdayaan dan perkembangan kepada indvidu pada Penyandang Disabilitas.

Oleh karena itu, Penyandang Disabilitas mampu seperti layaknya orang normal bisa berdaya dan bisa mandri untuk mengurangi stigma dari masyarakat dibutuhkan pemberdayaan kepada para Penyandang Disabilitas dan Penyandang Disabilitas mampu meningkatkan taraf hidup ke yang lebih baik dalam segi ekonomi.

Selanjutnya praktikan menggunakan analisis pohon masalah sebagai alat untuk menganalisis fokus masalah mengenai Penyandang Disabilitas di Kelurahan Cicaheum.

Gambar 2.3 Analisis Pohon Masalah Pemberdayaan

b. Dampak Masalah

Berdasarkan hasil analisis pohon masalah, dapat disimpulkan dampak permasalahannya, yaitu:

a. Tingkat kepercayaan diri yang menurun
b. Kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas yang kurang

c. Munculnya pengangguran pada Penyandang Disabilitas

c. Identifikasi Kebutuhan

Dari permasalahan di atas, dapat ditentukan bahwa kebutuhan sesuai dengan permasalahan :

1. Kebutuhan akan pemberian motivasi diri
2. Kebutuhan akan pelatihan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas agar memiliki kemampuan untuk bekerja.

d. Identifikasi Sistem Sumber

Sistem sumber dalam kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai potensi dan sumber yang dapat digunakan dalam usaha kesejahteraan sosial ataupraktik pekerjaan sosial, selain itu sistem sumber pekerjaan sosial merupakan sesuatu yang memiliki nilai dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan serta memecahkan suatu masalah. Pincus dan Minahan (1973:4) mengklasifikasikan sistem sumber kesejahteraan sosial menjadi sistem sumber informal atau alamiah, sistem sumber formal, dan sistem sumber kemasyarakatan. Sistem sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pemecahan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sistem sumber informal ;
   a. Karang Taruna Kota Bandung
   b. Pekerja sosial
2) Sistem sumber kemasyarakatan
   a. Dinas Sosial Kota Bandung
   b. Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung
   c. Kelurahan Cicaheum

2.3.4 Rencana Intervensi

a. Latar belakang

Penyadang Disabilitas juga merupakan manusia yang memiliki kemampuan dan bakatnya masing-masing, mereka juga berhak untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana manusia lainnya. Namun, tekanan emosional dan fisik memaksa mereka untuk menerima keadaan diri mereka yang berbeda dengan manusia lainnya. Untuk menangani permasalahan tersebut, perlu diberdayakan, diberi kemampuan dan diberi peningkatan kapasitas bagi kelompok Penyandang Disabilitas di Kelurahan Cicaheum. Selain itu, pemberian motivasi dan dukungan dari orang-orang terdekat juga sangat berpengaruh dalam proses peningkatan kapasitas.

Sehingga setelah mereka berkembang dan berdaya, stigma-stigma negatif mengenai Penyandang Disabilitas akan hilang dengan perlahan, diganti dengan kalimat-kalimat pujian yang menjadikan Penyandang Disabilitas sebagai manusia terhormat yang berdaya. Oleh karena itu, praktikan berencana untuk membentuk suatu program Peningkatan Kapasitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kelurahan Cicaheum.

1. Tujuan umum dan khusus

1. Tujuan umum
   Tujuan umum dari Program Peningkatan Kapasitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kelurahan Cicaheum adalah untuk meningkatkan kapasitas pelatihan kerja dan pemberian motivasi diri.
2. Tujuan khusus
   Tujuan dari program ini yaitu :
   a) Meningkatan kapasitas *skill* bagi Penyandang Disabilitas di Kelurahan Cicaheum
   b) Meningkatan motivasi diri bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung

2. Bentuk Kegiatan dan Program

Dalam rencana penanganan masalah Pemberdayaan pada Penyandang Disabilitas ini, praktikan berfokus pada penyelenggaraan kegiatan sosialisasi peningkatan motivasi Penyandang Disabilitas agar merasa terdorong dan menimbulkan semangat untuk berkembang dan berdaya. Kegiatan sosialisasi ini akan diisi oleh narasumber yang memiliki kemampuan memotivasi orang lain, terutama Penyandang Disabilitas. Kemudian dilanjut dengan kegiatan pelatihan kerja kepada Penyandang Disabilitas. Untuk kegiatan pelatihan kerja ini akan dibawakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung danlebih berfokus pada pemilihan minat kerja dengan penggambaran beberapa contoh pekerjaan.

1. Kegiatan sosialisasi mengenai motivasi diri terhadap Penyandang Disabilitas
2. Kegiatan pelatihan kerja kepada Penyandang Disabilitas

3. Sistem Partisipan

Sistem partisipasi dalam Peningkatan Kapasitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kelurahan Cicaheum, sebagai berikut:

Tabel 2.9 Sistem partisipan Program Pemberdayaan

No.	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	Sistem Inisiator	Pekerja Sosial
2.	Sistem Agen Perubahan	1. Pekerja Sosial 2. Dinas Sosial Kota Bandung
3.	Sistem klien	Penyandang Disabilitas Kelurahan Cicaheum
4.	Sistem Support	1. Pemerintah Daerah Kota Bandung 2. Dinas Sosial Kota Bandung 3. Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung
5.	Sistem Pengontrol	1. Pekerja Sosial 2. Kelurahan Cicaheum
6.	Sistem pelaksanaan	1. Pekerja Sosial 2. Dinas Sosial Kota Bandung
7.	Sistem Sasaran	Penyandang Disabilitas Kelurahan Cicaheum
8.	Sistem Aksi	1. Pekerja Sosial 2. Dinas Sosial 3. Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung

4. Metode dan Teknik

Metode yang digunakan adalah *Community Organization and Community Developmen*t (COCD). COCD adalah metode praktik profesional untuk mengubah sistem sasaran yang berada di atas individu, kelompok, dan keluarga. Sistem sasaran tersebut yakni local organization, masyarakat lokal itu sendiri, serta organisasi dalam masyarakat.

Teknik yang akan digunakan yaitu dengan teknik peningkatan kapasitas dan penyuluhan sosial. Untuk capacity buliding bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kepada masyarakat meluli pelatihan mengenai Program risiko bencana gempa bumi. Untuk penyuluhan bertujuan penngubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi oleh Penyuluh Sosial baik secara lisan maupun tulisan.

5. Rencana anggaran biaya dan alat yang dibutuhkan

Perhitungan biaya yang akan dikeluarkan pada program peningkatan kapasitas Penyandang Disabilitas di Kelurahan Cicaheum sebagai berikut:

Tabel 2.10 RAB Program Pemberdayaan

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1.	**Logistik**				
	ATK	3	Pack	50.000	150.000
	Banner	2	Buah	120.000	240.000
	Jumlah				**290.000**
2.	**Honorarium Narasumber dan Tim Pendamping**				
	Dinas Sosial Kota Bandung	1	Orang	500.000	500.000
	Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung	1	Orang	500.000	500.000
	Jumlah				**1.000.000**
3.	**Konsumsi**				
	Snack Peserta	20	Orang	5.000	100.000
	Snack Narasumber	2	Orang	10.000	20.000
	Snack Panitia	10	Orang	5.000	5.000
	Jumlah				**125.000**
	Jumlah Keseluruhan				**1.415.000**

6. Alat yang dibutuhkan

Berikut daftar alat-alat yang dibutuhkan dalam Program Peningkatan Kapasitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kelurahan Cicaheum.

Tabel 2.11 Kebutuhan alat Program Pemberdayaan

Nama Alat	Jumlah
Sound System	1 set
Mikrofon	2
Laptop	2
Proyektor	1
Kursi	50
Meja	4

7. Analisis Kelayakan Program

Berikut hasil analisis kelayakan Program Peningkatan Kapasitas Penyandang Disabilitas di Kelurahan Cicaheum :

Tabel 2.12 SWOT Program Pemberdayaan

	Kekuatan (*Strength*): 1. Dukungan dari pemerintah Daerah 2. Dukungan dari Kelurahan Cicaheum	**Kelemahan (*Weakness*):** Anggaran biaya cukup kecil
Peluang (*Opportunity*): 1. Adanya dukungan dari *stakeholder* 2. Narasumber merupakan pihak yang kompeten di bidangnya	**Strategi SO:** 1. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak maka program akan berjalan dengan baik 2. Merencanakan program bersama dengan ahli dan *stakeholder*	**Strategi WO:** Menyusun proposal program dan diajukan kepada *stakeholder*
Ancaman (*Threats*): Peserta yang tidak hadir akibat terkendala transportasi	**Strategi ST:** 1. Melakukan penjemputan oleh panitia 2. Meyakinkan sistem sasaran kegiatan apabila program akan melibatkan yang ahli	**Strategi WT:** Meyakinkan sistem sasaran kegiatan apabila program akan mendapat dukungan dari *stakeholder* dan ahli

8. Jadwal dan Langkah – langkah

Langkah–langkah kegiatan yang dilakukan dalam Program Pemberdayaan Peningkatan Kapasitas Penyandang Disabilitas di Kelurahan Cicaheum :

1. Tahap persiapan

a. Membentuk panitia kegiatan. Pembentukan panitia kegiatan dilakukan dengan mengumpulkan sumber daya manusia yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan program. Sumber daya manusia yang dilibatkan merupakan perwakilan dari semua unsur yang terlibat. Tahap persiapan bertujuan untuk membentuk koordinasi diantara sumber daya manusia yang terlibat.
b. Menyusun rancangan kegiatan program. Pada kegiatan penyusunan rancangan kegiatan ini akan dilakukan kegiatan *brainstorming* diantara semua panitia kegiatan mengenai pelaksanaan bentuk kegiatan, pengisi kegiatan, alat dan bahan yang diperlukan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan tempat pelaksanaan kegiatan. Rancangan kegiatan dibuat sedetail mungkin untuk memudahkan dalam penyusunan proposal kegiatan.
c. Menyusun proposal kegiatan. Penyusunan proposal ini dilakukan dengan melibatkan semua panitia kegiatan. Penyusunan proposal kegiatan ini ditujukan untuk memudahkan dalam upaya memperoleh izin pelaksanaan program dan ditujukan untuk memperoleh persetujuan dengan narasumber.
d. Mempersiapkan kebutuhan alat dan bahan. Kegiatan persiapan kebutuhan alat dan bahan merupakan kegiatan pengumpulan alat dan bahan yang sudah direncanakan sebelumnya. Panitia melakukan pengecekan terkait kecukupan alat dan bahan yang diperlukan sesuai perencanaan.
e. Melakukan *briefing*. Kegiatan *briefing* ini diperlukan untuk memastikan koordinasi terakhir sebelum program dilaksanakan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan program. Kegiatan ini akan dipimpin oleh ketua panitia dan diikuti oleh semua panitia.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan Program Pemberdayaan Peningkatan Kapasitas Penyandang Disabilitas di Kelurahan Cicaheum terdapat beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Sosialisasi Kegiatan Mengenai Peningkatan Kapasitas Diri Bagi Penyandang Disabilitas

Kegiatan sosialisasi ini merupakan upaya pemecahan masalah Penyandang Disabilitas yang kurang berdaya dalam

sektor pekerjaan karena kurangnya motivasi dan semangat. Kegiatan ini akan melibatkan beberapa pihak dan *stakeholder*. Kegiatan ini akan dimulai dengan pemaparan mengenai makna hidup dan pentingnya untuk meningkatkan kapasitas diri, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan mengenai pengenalan kemampuan-kemampuan yang mampu dilakukan oleh Penyandang Disabilitas dipandu oleh tim dari Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung.

Tabel 2.13 Susunan acara Program Pemberdayaan

Kegiatan	Waktu	Durasi	Pelaksana
Persiapan Kegiatan	07.30–08.00	30’	Panitia
Registrasi Peserta	08.00–08.30	30’	Panitia
Pembukaan	08.30–08.45	15’	MC
Sambutan	08.45–09.00	15’	Perwakilan Pemerintah Daerah
Pembacaan Do’a	09.00–09.10	10’	Panitia
Sosialisasi Kegiatan Mengenai Peningkatan Kapasitas Diri bagi Penyandang Disabilitas	09.10–10.10	60’	Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Sosial Kota Bandung
Pemaparan Pengenalan Kemampuan-kemampuan yang Mampu Dilakukan Penyandang Disabilitas	10.10–11.10	60’	Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Sosial Kota Bandung
Sesi Diskusi	11.10–12.00	20’	Peserta
Istirahat	12.00–13.00	60’	Panitia
Dokumentasi	13.00–13.15	15’	Panitia
Penutupan	13.15–13.20	5’	MC

b. Kegiatan pelatihan kerja kepada Penyandang Disabilitas

Kegiatan pelatihan ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan sosialisasi di atas. Kegiatan pelatihan ini hanya berfokus pada pengenalan bidang-bidang pekerjaan dan kemampuan yang dapat dilakukan oleh Penyandang Disabilitas. Kegiatan ini akan dipandu oleh tim Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung.

9. Tahap Pengakhiran

a. Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi merupakan kegiatan refleksi atau peninjauan

kembali antara proses dengan hasil yang telah dicapai dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam kegiatan evaluasi ini dilakukan dengan dua bentuk, yakni evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan dalam setiap tahapan kegiatan. Tujuan dilakukannya evaluasi proses adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pencapaian tujuan. Evaluasi hasil merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan diakhir kegiatan atau program. Tujuan dilakukannya evaluasi hasil adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan setelah pelaksanaan program.

Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program, memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang kita lakukan, monitoring melibatkan pengamatan atas kualitas dari layanan yang kita berikan. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan oleh pekrja sosial dan pihak Kelurahan Cicaheum yang akan dilaksanakan satu bulan sekali.

b. Pelaporan

Pelaporan Program Pemberdayaan Peningkatan Kapasitas Penyandang Disabilitas di Kelurahan Cicaheum merupakan kegiatan penyusunan laporan pertanggung jawaban secara tertulis dari pelaksanaan program kepada pihak yang memiliki otoritas dan yang sudah terlibat dalam pelaksanaan program, yaitu, Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Sosial Kota Bandung. Pelaporan kegiatan ini juga dapat digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan program-program selanjutnya.

2.4 Profil Analis Penataan Lingkungan Sosial

2.4.1 Gambaran Umum

Penduduk Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010 berjumlah 43,7 juta jiwa, dengan pertumbuhan 1,49 persen per tahun diproyeksikan pada tahun 2030 jumlah penduduk Jawa Barat akan mencapai 60 juta jiwa, suatu jumlah yang fantastis. Ledakan penduduk seperti itu akan akan menciptakan berbagai persoalan pelik seperti krisis pangan, kemiskinan, keterbatasan lahan tempat tinggal, kerusakan lingkungan, dan tingginya angka kriminalitas. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Pemerintah Jawa Barat memiliki komitmen untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat miskin melalui program perbaikan rumah tidak layak huni. Kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah perkotaan Provinsi Jawa Barat (9 Kota) sampai pada tahun 2014 sebanyak 17.511 unit yang tersebar di 378 kelurahan.

Kondisi wilayah Kelurahan Cicaheum merupakan daerah yang berada di tengah perkotaan dengan memiliki zona yang padat dan menjadi salah satu pusat perekonomian di Kota Bandung. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya fasilitas yang terdapat di Kelurahan Cicaheum. Dengan luas wilayah 167,67 km2 dikatakan memiliki lokasi yang sangat strategis, Kelurahan Cicaheum memiliki 12 RW dengan 77 RT yang masing-masing memiliki berbagai karateristik dan potensi wilayah yang berbeda. Kelurahan Cicaheum merupakan pusat wilayah yang cukup ramai dengan memiliki terminal yang cukup besar sebagai lokasi transit kendaraan umum dari berbagai daerah. Lokasi strategis ini menjadikan kelurahan Cicaheum menjadi berkembang terlebih dalam bidang perekonomiannya, karena dengan tersedianya fasilitas umum baik terminal, sekolah juga pasar dapat menjadi ladang pekerjaan bagi warga sekitar. Jumlah penduduk di Kelurahan Cicaheum sendiri kini mencapai 17.418 jiwa. Dengan jumlah yang banyak tersebut menjadikan Kelurahan Cicaheum sebagai salah satu kelurahan terpadat di Kota Bandung.

Berdasarkan jumlah penduduk yang mencapai 17.418 jiwa permukiman, tentu mempengaruhi tingkat permukiman di Kelurahan Cicaheum. Kini wilayah Kelurahan Cicaheum terbilang cukup padat dengan banyaknya rumah-rumah warga yang masuk ke dalam gang-gang yang bahkan mobil pun tidak bisa masuk ke dalamnya. Dengan

sempitnya jalan-jalan yang ada di beberapa RW di Kelurahan Cicaheum tentunya menghambat mobilitas masyarakatnya. Hal ini juga menyebabkan tidak terdapatnya ruang terbuka hijau di beberapa RW di Kelurahan Cicaheum sehingga masyarakat tidak memiliki tempat untuk bersantai untuk menghilangkan penat atau tempat bermain bagi anak-anak.

2.4.2 Tinjauan Konsep

a. Definisi Permukiman

Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, yaitu permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Sedangkan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Permukiman Menurut Hadi Sabari Yunus (1987) dalam Wesnawa (2015:2) dapat diartikan sebagai bentukan baik buatan manusia ataupun alami dengan segala kelengkapannya yang digunakan manusia sebagai individu maupun kelompok untuk bertempat tinggal baik sementara maupun menetap dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya. Sedangkan Perumahan dikenal dengan istilah housing. Housing berasal dari bahasa inggris yang memiliki arti kelompok rumah. Perumahan adalah kumpulan rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal. Sebagai lingkungan tempat tinggal, perumahan dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. (menurut Sadana 2014:19).

b. Definisi Ruang Terbuka Hijau

Secara umum ruang terbuka publik (*open spaces*) di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tamanan dan vegetasi guna mendukung manfaat ekologis, sosial budaya, dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya. Ruang terbuka non-hijau dapat

berupa ruang terbuka yang diperkeras (*paved*) maupun ruang terbuka biru yang berupa permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan sebagai genangan retensi. (Dwiyanto, 2009).

Menurut Peraturan Mentri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa luas RTH dialokasikan 10% untuk RTH privat dan 20% lainnya untuk RTH publik.

c. Manfaat Ruang Terbuka Hijau

1) Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah).
2) Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangible*), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan keberlangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

2.4.3 Asesmen

Kondisi wilayah Kelurahan Cicaheum merupakan daerah yang berada di tengah perkotaan dengan memiliki zona yang padat dan menjadi salah satu pusat perekonomian di Kota Bandung. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya fasilitas yang terdapat di Kelurahan Cicaheum. Dengan luas wilayah 167,67 km2 dikatakan memiliki lokasi yang sangat strategis, Kelurahan Cicaheum memiliki 12 RW dengan 77 RT yang masing-masing memiliki berbagai karateristik dan potensi wilayah yang berbeda. Kelurahan Cicaheum merupakan pusat wilayah yang cukup ramai dengan memiliki terminal yang cukup besar sebagai lokasi transit kendaraan umum dari berbagai daerah. Lokasi strategis ini menjadikan kelurahan Cicaheum menjadi berkembang terlebih dalam

bidang perekonomiannya, karena dengan tersedianya fasilitas umum baik terminal, sekolah juga pasar dapat menjadi ladang pekerjaan bagi warga sekitar. Jumlah penduduk di Kelurahan Cicaheum sendiri kini mencapai 17.418 jiwa. Dengan jumlah yang banyak tersebut menjadikan Kelurahan Cicaheum sebagai salah satu kelurahan terpadat di Kota Bandung.

Berdasarkan jumlah penduduk yang mencapai 17.418 jiwa permukiman, tentu mempengaruhi tingkat permukiman di Kelurahan Cicaheum. Kini wilayah Kelurahan Cicaheum terbilang cukup padat dengan banyaknya rumah-rumah warga yang masuk ke dalam gang-gang yang bahkan mobil pun tidak bisa masuk ke dalamnya. Dengan sempitnya jalan-jalan yang ada di beberapa RW di Kelurahan Cicaheum tentunya menghambat mobilitas masyarakatnya. Dan tentu saja berdasarkan hal tersebut tidak memungkinkan untuk membangun ruang terbuka hijau di wilayah RW 01.

Berdasarkan pengamatan praktikan di lokasi RW 01, mayoritas jalannya merupakan gang-gang sempit yang bahkan apabila motor berpapasan salah satunya harus mengalah untuk mundur. Kemudian belum terdapatnya lahan terbuka untuk masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk dibangun ruang terbuka hijau. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan Program Sosialisasi Pembuatan Taman untuk Masyarakat RW 01.

a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil asesmen praktikan, dapat disimpulkan beberapa penyebab masalah penataan Lingkungan wilayah RW 01 Kelurahan Cicaheum, yaitu:

1. Sempitnya jalan-jalan yang ada di dalam RW 01 Kelurahan Cicaheum

   Hal ini terjadi karena lahan permukiman yang tidak mampu menampung rumah warga namun tetap dibangun rumah sehingga memaksa jalan-jalan tersebut menjadi sempit dan tidak bisa dilewati mobil.

2. Permukiman yang padat

   Kelurahan Cicaheum merupakan salah satu kelurahan yang padat karena terdapat terminal bus di dalamnya. Hal ini mengakibatkan para pendatang untuk tanggal di wilayah Cicaheum dengan menyewa kontrakan.

3. Belum ruang terbuka hijau

   Karena terbatasnya lahan yang ada di wilayah RW 01 dan kurangnya perhatian masyarakat akan pembuatan tamanuntuk masyarakat RW 01.

Berdasarkan deskripsi permasalahan di atas, praktikan menggunakan pohon masalah untuk menentukan fokus atau prioritas masalah yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.4 Analisis pohon masalah penataan Lingkungan

d. Fokus Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada pada wilayah RW

01, terdapat fokus masalah dalam praktikum analis penataan lingkungan sosial, yaitu Permukiman di Wilayah RW 01 yang Padat Sehingga Tidak Memungkinkan Untuk Pembangunan Taman

e. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan pohon masalah di atas, dapat ditentukan bahwa kebutuhan sesuai permasalahan yang ada di wilayah RW 01 adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan akan pemberian pengetahuan mengenai pentingnya ruang terbuka hijau
2. Kebutuhan akan penyediaan ruang terbuka hijau dengan membangun taman

f. Identifikasi Potensi dan Sumber

Sistem sumber dalam kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai potensi dan sumber yang dapat digunakan dalam usaha kesejahteraan sosial atau praktik pekerjaan sosial, selain itu sistem sumber pekerjaan sosial merupakan sesuatu yang memiliki nilai dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan serta memecahkan suatu masalah. Pincus dan Minahan (1973:4) mengklasifikasikan sistem sumber kesejahteraan sosial menjadi sistem sumber informal atau alamiah, sistem sumber formal, dan sistem sumber kemasyarakatan. Sistem sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pemecahan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Sistem sumber informal:

1. Pekerja sosial
2. Masyarakat Kelurahan Cicaheum

Sistem sumber formal:

1. DPKP Bandung
2. Pemerintah Kota Bandung
3. Karang Taruna Kelurahan Cicaheum

2.4.4 Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Kondisi wilayah Kelurahan Cicaheum merupakan daerah yang berada di tengah perkotaan dengan memiliki zona yang padat dan menjadi salah satu pusat perekonomian di Kota Bandung. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya fasilitas yang terdapat di Kelurahan Cicaheum. Dengan luas wilayah 167,67 km2 dikatakan memiliki lokasi yang sangat strategis, Kelurahan Cicaheum memiliki 12 RW dengan 77 RT yang masing-masing memiliki berbagai karateristik

dan potensi wilayah yang berbeda. Kelurahan Cicaheum merupakan pusat wilayah yang cukup ramai dengan memiliki terminal yang cukup besar sebagai lokasi transit kendaraan umum dari berbagai daerah. Lokasi strategis ini menjadikan kelurahan Cicaheum menjadi berkembang terlebih dalam bidang perekonomiannya, karena dengan tersedianya fasilitas umum baik terminal, sekolah juga pasar dapat menjadi ladang pekerjaan bagi warga sekitar. Jumlah penduduk di Kelurahan Cicaheum sendiri kini mencapai 17.418 jiwa. Dengan jumlah yang banyak tersebut menjadikan Kelurahan Cicaheum sebagai salah satu kelurahan terpadat di Kota Bandung.

Berdasarkan hasil asesmen praktikan di wilayah RW 01 Kelurahan Cicaheum, praktikan merencanakan untuk mengadakan Program Sosialisasi Pembuatan Taman untuk Masyarakat RW 01 untuk membantu menciptakan ruang terbuka hijau bagi seluruh masyarakat RW 01.

b. Tujuan umum dan khusus

1. Tujuan Umum

   Tujuan umum yang ingin dicapai dari Program Sosialisasi Pembuatan Taman untuk Masyarakat RW 01 adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat RW 01 mengenai pentingnya ruang terbuka hijau dalam suatu permukiman..
2. Tujuan Khusus

   Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam Program Sosialisasi Mitigasi Kebakaran Bagi Masyarakat RW 01 Kelurahan Cicaheum adalah sebagai berikut :
   a. Membangun taman di wilayah RW 01.
   b. Memfasilitasi anak-anak untuk menyediakan tempat bermain yang aman dan nyaman.

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Berdasarkan hasil analisis masalah yang telah dirumuskan, maka praktikan mengajukan suatu program. Program yang diusulkan yaitu “Program Sosialisasi Pembuatan Taman untuk Masyarakat RW 01”. Bentuk programnya adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Ruang Terbuka Hijau

   Kegiatan sosialisasi menitikberatkan sebagai proses penyadaran

dengan penekanan pada: (1) Re-orientasi sikap dan pola pikir dan pandangan dalam pentingnya ruang terbuka hijau dalam suatu wilayah, (2) Pengenalan dan pemahaman konsep ruang terbuka hijau, (3) Pemaparan dari fungsi dan manfaat dari adanya ruang terbuka hijau bagi wilayah RW 01.

d. Sistem Partisipan

Sistem partisipan dalam Program Sosialisasi Pembuatan Taman untuk Masyarakat RW 01 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14 Sistem partisipan Program Sosialisasi Ruang Terbuka Hijau

No.	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	Sistem Inisiator	Pekerja Sosial
2.	Sistem Agen Perubahan	Pekerja Sosial
3.	Sistem klien	1. Masyarakat Kota Bandung 2. Karang Taruna
4.	Sistem Support	1. Pemerintah Daerah Kota Bandung 2. DPKP Kota Bandung
5.	Sistem Pengontrol	DPKP Kota Bandung
6.	Sistem pelaksanaan	1. Pekerja Sosial 2. DPKP Kota Bandung 3. Masyarakat 4. Karang Taruna
7.	Sistem Sasaran	1. Masyarakat 2. Karang Taruna
8.	Sistem Aksi	1. Pekerja Sosial 2. DPKP Kota Bandung

e. Metode dan Teknik

1. Metode

Metode yang digunakan yaitu metode *Community Organization and Community Developmentt* (CO/CD). Menurut *Social Work Dictionary*, *Community Organization* (CO) diartikan sebagai suatu proses intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial dan atau profesi lain dalam rangka menolong individu, kelompok, dan masyarakat yang mempunyai kepentingan bersama dan berada dalam suatu daerah tertentu. Tujuan pertolongannya untuk memecahkan masalah

sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui usaha bersama yang terencana.

Community Development (CD) adalah upaya yang dilakukan oleh profesional dan penduduk setempat untuk meningkatkan ikatan sosial diantara anggota masyarakat, meningkatkan motivasi warga masyarakat agar mampu menolong diri mereka sendiri, mengembangkan tanggung jawab kepemimpinan lokal, dan menciptakan atau merevitalisasi institusi lokal.

2. Teknik

Teknik yang digunakan dalam Program Sosialisasi Mitigasi Kebakaran Bagi Masyarakat RW 01 Kelurahan Cicaheum adalah teknik sosialisasi dengan target masyarakat RW 01. Dengan menggunakan teknik ini diharapkan masyarakat mampu memahami materi yang dibawakan dan mampu membawa perubahan yang signifikan bagi wilayah RW 01.

f. Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan

Anggaran biaya merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Anggaran yang proposional dapat digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan secara optimal. Rencana anggaran biaya program dalam bentuk matriks berikut:

Tabel 2.15 RAB Program Sosialisasi Ruang Terbuka Hijau

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1.	**Logistik**				
	ATK	3	Pack	50.000	150.000
	Banner	1	Buah	20.000	20.000
	Jumlah				**170.000**
2.	**Honorarium Narasumber dan Tim Pendamping**				
	BKPB Kota Bandung	3	Orang	1.000.000	3.000.000
	Jumlah				**3.000.000**
3.	**Konsumsi**				
	Snack Peserta	50	Orang	5.000	255.000
	Snack Narasumber	4	Orang	10.000	40.000
	Snack Panitia	10	Orang	5.000	50.000
	Jumlah				**345.000**
	Jumlah Keseluruhan				**4.635.000**

g. Analisis Kelayakan Program

Analisis kelayakan program merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur kepantasan suatu program yang dilihat dari indikator kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Berikut merupakan matriksanalisis SWOT. Matriks Analisis Kelayakan Program Sosialisasi Mitigasi Kebakaran Bagi Masyarakat RW 01 Kelurahan Cicaheum.

Tabel 2.16 SWOT Program Sosialisasi Ruang Terbuka Hijau

	Kekuatan (*Strength*): 3. Antusias pengurus RW 01 4. Dukungan dari Kelurahan Cicaheum	**Kelemahan (*Weakness*):** Anggaran biaya cukup kecil
Peluang (*Opportunity*): 3. Adanya dukungan dari *stakeholder* 4. Narasumber merupakan pihak yang kompeten di bidangnya	**Strategi SO:** 3. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak maka program akan berjalan dengan baik 4. Merencanakan program bersama dengan ahli dan *stakeholder*	**Strategi WO:** Menyusun proposal program dan diajukan kepada *stakeholder*
Ancaman (*Threats*): Peserta yang tidak hadir akibat terkendala urusan lain	**Strategi ST:** 3. Melakukan penjadwalan kegiatan yang baik 4. Meyakinkan sistem sasaran kegiatan apabila program akan melibatkan yang ahli	**Strategi WT:** Meyakinkan sistem sasaran kegiatan apabila program akan mendapat dukungan dari *stakeholder* dan ahli

h. Jadwal dan Langkah-langkah

Langkah-langkah kegiatan yang disusun dalam Program Sosialisasi Pembuatan Taman untuk Masyarakat RW 01 adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
   a) Membentuk panitia kegiatan. Pembentukan panitia kegiatan dilakukan dengan mengumpulkan sumber daya manusia yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan program. Sumber daya manusia yang dilibatkan merupakan perwakilan dari semua unsur yang terlibat. Tahap persiapan bertujuan untuk membentuk koordinasi diantara sumber daya manusia yang terlibat.
   b) Menyusun rancangan kegiatan program. Pada kegiatan penyusunan rancangan kegiatan ini akan dilakukan kegiatan brainstorming diantara semua panitia kegiatan mengenai pelaksanaan bentuk kegiatan, pengisi kegiatan, alat dan bahan yang diperlukan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan tempat pelaksanaan kegiatan. Rancangan kegiatan dibuat sedetail mungkin untuk memudahkan dalam penyusunan proposal kegiatan.
   c) Menyusun proposal kegiatan. Penyusunan proposal ini dilakukan dengan melibatkan semua panitia kegiatan. Penyusunan proposal kegiatan ini ditujukan untuk memudahkan dalam upaya memperoleh izin pelaksanaan program, ditujukan dalam upaya mencapai program pemerintah yang sesuai, dan ditujukan untuk memperoleh persetujuan dengan narasumber.
   d) Mempersiapkan kebutuhan alat dan bahan. Kegiatan persiapan kebutuhan alat dan bahan merupakan kegiatan pengumpulan alat dan bahan yang sudah direncanakan sebelumnya. Panitia melakukan pengecekan terkait kecukupan alat dan bahan yang diperlukan sesuai perencanaan.
   e) Melakukan *briefing*. Kegiatan *briefing* ini diperlukan untuk memastikan koordinasi terakhir sebelum program dilaksanakan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan program. Kegiatan ini akan dipimpin oleh ketua panitia dan diikuti oleh semua panitia.

1. Tahap Pelaksanaan

   Dalam tahap pelaksanaan Program Sosialisasi Pembuatan Taman untuk Masyarakat RW 01 akan dilaksanakan sebagai berikut:

   a) Sosialisasi Ruang Terbuka Hijau.

      Kegiatan Sosialisasi Ruang Terbuka Hijau akan melibatkan

beberapa pihak masyarakat dan *stakeholder* akan dimulai dengan kegiatan pemaparan mengenai konsep dan potensi kebakaran yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penanganan darurat apabila terjadi kebakaran.

Tabel 2.17 Susunan acara Program Sosialisasi Ruang Terbuka Hijau

Kegiatan	**Waktu**	**Durasi**	**Pelaksana**
Persiapan Kegiatan	07.30–08.00	30’	Panitia
Registrasi Peserta	08.00–08.30	30’	Panitia
Pembukaan	08.30–08.45	15’	MC
Sambutan	08.45–09.00	15’	Perwakilan Pemerintah Daerah
Pembacaan Do’a	09.00–09.10	10’	Panitia
Pemaparan materi mengenai konsep ruang terbuka hijau	09.10–10.10	60’	DPKP Kota Bandung
Tanya Jawab	10.10–10.30	20’	Peserta
Dokumentasi	10.30–10.35	5’	Panitia
Penutupan	10.35–10.40	5’	MC

2. Tahap Pengakhiran

Tahap pengakhiran merupakan tahap penghujung dari rangkaian kegiatan. Kegiatan pada tahap ini meliputi evaluasi dan pelaporan kegiatan:

a) Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan refleksi atau peninjauan kembali antara proses dengan hasil yang telah dicapai dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam kegiatan evaluasi ini dilakukan dengan dua bentuk, yakni evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan dalam setiap tahapan kegiatan. Tujuan dilakukannya evaluasi proses adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pencapaian tujuan. Evaluasi hasil merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan diakhir kegiatan atau program. Tujuan dilakukannya evaluasi hasil adalah untuk

mengetahui tingkat pencapaian tujuan setelah pelaksanaan program.

b) Pelaporan Program

Pelaporan Program Sosialisasi Pembuatan Taman untuk Masyarakat RW 01 merupakan kegiatan penyusunan laporan pertanggung jawaban secara tertulis dari pelaksanaan program kepada pihak yang memiliki otoritas dan yang sudah terlibat dalam pelaksanaan program, yakni DPKP Kota Bandung dan RW 01 Kelurahan Cicaheum. Pelaporan kegiatan ini juga dapat digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan program-program selanjutnya.

2.5 Profil Analis Penanggulangan Bencana

2.5.1 Gambaran Umum

Indonesia merupakan negara yang terletak pada tiga jalur pertemuan lempeng tektonik yang bergerak aktif sehingga di Indonesia sering terjadi gempa bumi. Tiga lempeng tersebut adalah lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Pergerakan ketiga lempeng tersebut menyebabkan pulau-pulau di Indonesia sering mengalami getaran gempa, khususnya di daerah pertemuan lempeng yaitu pertemuan lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Kepulauan Nusa Tenggara; dan pertemuan lempeng Indo-Australia dan Pasifik di sekitar Pulau Papua.

Pulau Jawa terletak pada jalur pertemuan lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia yaitu lempeng Indo-Australia menunjam dibawah lempeng Eurasia yang menghasilkan zona subduksi. Pertemuan kedua lempeng ini mengasilkan getaran gempa dengan intensitas kekuatan yang berbeda-beda. Selain itu, dengan adanya zona subduksi maka Indonesia juga banyak terdapat gunung api terutama disepanjang pulau Sumatra, Jawa, Nusa tenggara. Begitupun sesar atau patahan yang terjadi di kerak bumi. Keberdaanya dapat mempengaruhi kehidupannya. Salah satunya adalah Sesar Lembang.

Sesar Lembang merupakan salah satu sesar kuno yang ada di Indonesia dan berpotensi untuk selalu bergerak walau sedikit. Gerakan dari Sesar Lembang ini tentu akan mengguncang hampir seluruh wilayah Kota Bandung. Kelurahan Cicaheum berada tidak jauh dari lokasi patahan Sesar Lembang dan apabila sesar ini bergerak, tentu akan menggoncang wilayah Kelurahan Cicaheum dengan keras. Berdasarkan pengamatan praktikan dan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar,

Kelurahan Cicaheum masih jauh dari kata sadar akan respon bencana gempa. Belum didapatinya jalur evakuasi, tim siaga bencana, dan belum mendapat sosialisasi mitigasi bencana gempa dari pihak BPBD Jawa Barat. Hal ini tentu menjadikan wilayah Kelurahan Cicaheum sebagai wilayah yang rawan akan terjadinya bencana gempa.

Untuk meminimalisir dari banyaknya jumlah korban yang akan muncul ketika gempa terjadi, perlu dilakukan suatu program mitigasi bencana bagi seluruh masyarakat Kota Bandung dan khususnya untuk wilayah Kelurahan Cicaheum.

2.5.2 Tinjauan Konsep

a. Pengertian Bencana

Berdasarkan UU No.24/2007 tentang penanggulangan bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana adalah suatu kejadian alam, buatan manusia, atau perpaduan antara keduanya yang terjadi secara tiba-tiba sehingga menimbulkan dampak negatif yang dahsyat bagi kelangsungan kehidupan. Dalam kejadian tersebut, unsur yang terkait langsung atau terpengaruh harus merespons dengan melakukan tindakan luar biasa guna menyesuaikan sekaligus memulihkan kondisi seperti semula atau menjadi lebih baik (Arie Priambodo, 2009: 22)

b. Jenis-jenis Bencana

Menurut (Joko Christanto, 2011: 75), jenis-jenis bencana dapat dibedakan menjadi :

1. Bencana Alam
   Merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan diluar kekuasaan manusia.
2. Bencana Nonalam
   Merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam, seperti gagal teknologi, wabah penyakit, dan gagal modernisasi.
3. Bencana Sosial
   Merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perilaku manusia, seperti peperangan.

c. Pengertian Gempa Bumi

Gempa Bumi adalah goncangan akibat adanya gerakan, geseran, maupun patahan lapisan batuan didalam bumi (Departemen Komunikasi dan Informasi RI, 2008: 7). Menurut Joko Christanto (2011: 11), Gempa Bumi terjadi karena gesekan antar lempeng-lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. Pergesekan ini mengeluarkan energi yang luar biasa besar dan menimbulkan goncangan di permukaan

d. Jenis Gempa Bumi

1. Gempa Bumi Tektonik
   Yaitu gempa bumi yang disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik yang berupa pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar.
2. Gempa Bumi Vulkanik
   Gempa bumi runtuhan adalah gempa bumi yang terjadi akibat runtuhnya atap gua atau daerah kosong dibawah lahan mengalami keruntuhan, runtuhnya atap tambang, runtuhnya tanah, runtuhnya batuan, dan sebagainya.
3. Gempa Bumi Tumbukan
   Gempa bumi tumbukan terjadi sebagai akibat jatuhnya asteroid ke bumi.
4. Gempa Bumi Buatan
   Gempa bumi buatan terjadi karena ulah manusia itu sendiri, seperti peledak dinamit, nuklir, dan bom dengan kekuatan yang sangat besar.

e. Manajemen Bencana

Agus Rahmat dalam Hadi Purnomo dan Ronny Sugiantoro, 2010: 93 mendefinisikan manajemen bencana merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana. Tujuan manajemen bencana adalah:

a. Mencegah kehilangan jiwa

b. Mengurangi penderitaan manusia
c. Memberikan informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai risiko
d. Mengurangi kerusakan infrastuktur utama, harta benda, dan kehilangan sumber ekonomis.

Pengelolaan bencana yang efektif memerlukan kombinasi empat konsep, yaitu atas semua bahaya, menyeluruh, terpadu, dan kesiapan masyarakat (Hadi Purnomo dan Ronny Sugiantoro, 2010: 97). Siklus manajemen bencana merupakan proses pengalolaan bencana yang pada intinya merupakan tindakan pra bencana, menjelang bencana, saat bencana, dan pascabencana. Pra bencana kegiatannya meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Pada saat terjadi bencana berupa kegiatan tanggap darurat dan setelah terjadi bencana meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

2.5.2 Asesmen

Kota Bandung kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat, sekaligus menjadi ibukota provinsi tersebut. Kota ini terletak 140 km sebelah tenggara Jakarta, dan merupakan kota terbesar di wilayah Pulau Jawa bagianselatan. Kota ini sering dikunjungi dari berbagi orang karena kota kembang ini cukup sejuk untuk dijadikan tempat wisata ataupun tempat pendidikan. Namun kota ini rawan akan bencana karena dekat dengan Gunung Merapi yaitu Gunung Tangkuban Perahu dan dekat dengan patahan atau sesar Lembang.

Sesar Lembang, selain menampilkan keindahan berupa morfologi tebing yang memanjang lebih kurang 22 kilometer (km) dari Gunung Palasari di timur hingga Cisarua di barat, wilayah di sekitar sesar juga rawan gempa bumi. Hal tersebut dikarenakan bahwa Sesar atau Patahan Lembang, bersama dengan patahan lain– Patahan Cileunyi, Patahan Tanjungsari, dan Patahan Jati yang mengelilingi kota Bandung telah terdefinisi sebagai sumber gempa bumi patahan aktif yang harus diwaspadai. Berdasarkan hasil kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019, Jawa Barat berada di urutan pertama Lokasi Prioritas Nasional Untuk Bencana Gempa Bumi dan Bencana Gerakan Tanah, dengan kemungkinan jumlah yang terpapar adalah 33.015.075 dan 4.498.047 jiwa.

Kelurahan Cicaheum berada tidak jauh dari lokasi patahan Sesar

Lembang dan apabila sesar ini bergerak, tentu akan menggoncang wilayah Kelurahan Cicaheum dengan keras. Berdasarkan pengamatan praktikan dan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar, Kelurahan Cicaheum masih jauh dari kata sadar akan respon bencana gempa. Belum didapatinya jalur evakuasi, tim siaga bencana, dan belum mendapat sosialisasi mitigasi bencana gempa dari pihak BPBD Jawa Barat. Hal ini tentu menjadikan wilayah Kelurahan Cicaheum sebagai wilayah yang rawan akan terjadinya bencana gempa.

Walaupun letak tidak terlalu jauh dari sesar lembang tetap saja masih memiliki rawan bencana, sewaktu-waktu bencana akan datang dan masyarakat harus mengetahui bagaiman pentingnya tentang bencana ini terutama sesar atau patahan lembang, karena masih banyak masyarakat Kota Bandung yang belum mengetahui bahayanya sesar Lembang.

a. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan hasil asesmen diatas, dapat disimpulkan beberapa identifikasi permasalahan, sebagai berikut:

1) Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai mitigasi bencana gempa bumi
2) Kurangnya sosialisasi mengenai mitigasi bencana pada masyarakat Kelurahan Cicaheum
3) Kurangnya sarana dan prasarana yang dapat membantu ketika bencana gempa terjad

Berdasarkan deskripsi permasalahan di atas, praktikan menggunakan pohon masalah untuk menentukan fokus atau prioritas masalah yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.5 Analisis pohon masalah bencana

Dari hasil analisis pohon masalah, maka dapat disimpulkan beberapa penyebab terjadinya masalah, yaitu:

1) Tidak adanya sosialisasi mengenai kebencanaan, terutama bencana gempa bumi
2) Tidak tersedianya sarana dan prasarana kebencanaan

b. Dampak Masalah

Berdasarkan hasil analisis pohon masalah, dapat disimpulkan beberapa dampak masalah, yaitu:

1) Masyarakat sangat berisiko terdampak bencana gempa bumi akibat kurangnya pengetahuan mengenai mitigasi bencana
2) Dikhawatirkan akan banyak korban berjatuhan apabila bencana gempa terjadi, diakibatkan daerah Kelurahan Cicaheum yang padat penduduk.

c. Fokus Masalah

Fokus masalah berdasarkan analisis pohon masalah yaitu kurangnya pemahaman masyarakat Kelurahan Cicaheum mengenai pemahaman respon kebencanaan dalam menghadapi bencana gempa. Penting untuk masyarakat Kelurahan Cicaheum memiliki pengetahuan bencana dan kemampuan mengahadapi bencana agar risiko saat bencana tiba tidak mengkhawatirkan masyarakat Kelurahan Cicaheum.

Berdasarkan Hasil analisis pohon masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kelurahan Cicaheum, yaitu :

a. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bencana gempa bumi, sehingga masyarakat belum banyak mengetahui ketika datangnya gempa bumi.
b. Tidak adanya sosialisasi mengenai kebencanaan
c. Tidak tersedianya sarana dan prasarana kebencanaan
d. Belum ada kesiapsiagaan bencana
e. Rendahnya pengetahuan mengenai mitigasi bencana gempa

d. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan pohon masalah di atas, dapat ditentukan bahwa kebutuhan sesuai permasalahan adalah sebagai berikut :

a. Kebutuhan akan pemberian pengetahuan mengenai bencana

b. Kebutuhan akan pelaksanaan upaya mitigasi bencana
c. Kebutuhan akan sarana dan prasarana kebencanaan

e. Identifikasi Potensi dan Sumber

Sistem sumber dalam kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai potensi dan sumber yang dapat digunakan dalam usaha kesejahteraan sosial atau praktik pekerjaan sosial, selain itu sistem sumber pekerjaan sosial merupakan sesuatu yang memiliki nilai dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan serta memecahkan suatu masalah. Pincus dan Minahan (1973:4) mengklasifikasikan sistem sumber kesejahteraan sosial menjadi sistem sumber informal atau alamiah, sistem sumber formal, dan sistem sumber kemasyarakatan. Sistem sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pemecahan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Sistem sumber informal:

a. Pekerja sosial
b. Masyarakat Kelurahan Cicaheum

Sistem sumber formal:

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung
b. Pemerintah Kota Bandung
c. Karang Taruna Kelurahan Cicaheum

2.5.3 Rencana Intervensi

b. Latar belakang

Berdasarkan UU No.24/2007 tentang penanggulangan bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Potensi bencana Sesar Lembang tidak dapat diabaikan. Meski tidak berada di ruang yang dapat dihuni oleh manusia, tetapi keberadaannya dapat mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan ruang digunakan oleh manusia sebagai wadah untuk melaksanakan berbagai macam kegiatannya. Kawasan Cekungan Bandung, tempat Sesar Lembang berada telah ditetapkan menjadi Kawasan Perkotaan, bahkan Kawasan Metropolitan dan

Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi. Padahal, kawasantersebut merupakan kawasan rawan bencana, salah satunya gempa dan gerakantanah yang dapat diakibatkan oleh Sesar Lembang. Dalam tulisan ini, dilakukan kajian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, terhadap peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang yang berlaku secara umum di tingkat nasional dan secara khusus di area Cekungan Bandung. Dari hasil kajian hukum tersebut, diketahui bahwa demi terwujudnya keharmonisan dengan kondisi alam, diperlukan penataan ruang yang mengakomodir kondisi alam setempat. Arahan mitigasi dalam pengaturan penataan ruang telah ada, tetapi lebih mengarah pada apa yang seharusnya dilakukan ke depan, bukan pada perbaikan kondisi masa kini untuk mengurangi tingkat kerentanan di sekitar kawasan tersebut.

b. Tujuan umum dan khusus

Tujuan umum dari program Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi Sesar Lembang di Kelurahan Cicaheum yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan untuk mencapai kesiapsiagaan masyarakat Kelurahan Cicaheum dalam menghadapi bencana gempa bumi, adapun tujuan khususnya adalah:

1. Memanfaatkan peran karang taruna sebagai salah satu penggerak dalam mitigasi bencana Kelurahan Cicaheum
2. Memiliki kemampuan kesiapsiagaan bencana pada setiap individu masyarakat Kelurahan Cicaheum
3. Meningkatkan perhatian masyarakat dan pemerintah daerah mengenai pentingnya sosialisasi mitigasi bencana

a. Bentuk kegiatan dan program

Dalam rencana pemecahan masalah ini akan berfokus pada pemenuhan kebutuhan yakni melalui program sebagi berikut:

1. Sosialisasi mengenai bencana gempa bumi
2. Pembentukan Tim Siaga Bencana

d. Sistem partisipan

Partisipan untuk melakukan program "Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi" yang dilaksanakan di Kelurahan Cicaheum yaitu:

Tabel 2.18 Sistem partisipan Mitigasi Gempa

No.	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	Sistem Inisiator	Pekerja Sosial
2.	Sistem Agen Perubahan	Pekerja Sosial
3.	Sistem klien	1. Masyarakat Kota Bandung 2. Karang Taruna
4.	Sistem Support	1. Dinas Sosial Kota Bandung 2. BPBD Jawa Barat
5.	Sistem Pengontrol	BPBD Jawa Barat
6.	Sistem pelaksanaan	1. Pekerja Sosial 2. BPBD Jawa Barat 3. Masyarakat 4. Karang Taruna
7.	Sistem Sasaran	1. Masyarakat 2. Karang Taruna
8.	Sistem Aksi	1. Pekerja Sosial 2. Dinas Sosial Kota Bandung 3. BPBD Jawa Barat

e. Metode dan teknik

Metode yang digunakan adalah *Community Organization and Community Developmen*t (COCD). COCD adalah metode praktik professional untuk mengubah sistem sasaran yang berada di atas individu, kelompok, dan keluarga. Sistem sasaran tersebut yakni local organization, masyarakat lokal itu sendiri, serta organisasi dalam masyarakat.

Teknik yang akan digunakan yaitu dengan teknik peningkatan kapasitas dan penyuluhan sosial. Untuk peningkatan kapasitas bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kepada masyarakat meluli pelatihan mengenai Program risiko bencana gempa bumi. Untuk penyuluhan bertujuan pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi oleh Penyuluh Sosial baik secara lisan maupun tulisan.

f. Rencana anggaran biaya dan alat yang dibutuhkan

Perhitungan besaran biaya yang akan dikeluarkan pada program Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi Sesar Lembang sebagai berikut:

Tabel 2.19 RAB Mitigasi Gempa

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	**Logistik**				
	ATK	3	Pack	50.000	150.000
	Banner	2	Buah	120.000	240.000
	Jumlah				**290.000**
2.	**Honorarium Narasumber dan Tim Pendamping**				
	BPBD Kota Bandung	3	Orang	1.000.000	3.000.000
	Jumlah				**3.000.000**
3.	**Konsumsi**				
	Snack Peserta	51	Orang	5.000	255.000
	Snack Narasumber	4	Orang	10.000	40.000
	Snack Panitia	10	Orang	5.000	50.000
	Jumlah				**345.000**
	Jumlah Keseluruhan				**3.635.000**

g. Alat yang Dibutuhkan

Tabel 2.20 Daftar kebutuhan alat Mitigasi Gempa

Nama Barang	Jumlah
Sound system	1 set
Laptop	2
Kursi	50
Mikrofon	2
Meja	4
Proyektor	1

h. Analisis kelayakan program

Berikut hasil analisis kelayakan program Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi Sesar Lembang di Kota Bandung:

tabel 2.21 SWOT Mitigasi Gempa

	Kekuatan (*Strength*): Melibatkan *stakeholder* terkait	**Kelemahan (*Weakness*):** Anggaran biaya cukup besar
Peluang (*Opportunity*):. 1. Adanya dukungan dari *stakeholder* 2. Narasumber oleh ahli	**Strategi SO:** 1. Dengan adanya dukungan dari *stakeholder* maka program akan berjalan dengan baik 2. Merencanakan program bersama dengan ahli dan *stakeholder*	**Strategi WO:** Menyusun proposal program dan diajukan kepada *stakeholder*
Ancaman (*Threats*): Jumlah sistem sasaran yang besar	**Strategi ST:** Melaksanakan monitoring terkait pelaksanaan oleh sistem pengontrol	**Strategi WT:** Menyusun proposal program dan diajukan kepada *stakeholder* sehingga kegiatan berjalan semestinya dan anggaran yang besar dapat terlaksana

i. Jadwal dan langkah-langkah

Langkah–langkah kegiatan yang dilakukan dalam Program Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi di Kelurahan Cicaheum:

1) Tahap persiapan
   a) Membentuk panitia kegiatan. Pembentukan panitia kegiatan dilakukan dengan mengumpulkan sumber daya manusia yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan program. Sumber

daya manusia yang dilibatkan merupakan perwakilan dari semua unsur yang terlibat. Tahap persiapan bertujuan untuk membentuk koordinasi diantara sumber daya manusia yang terlibat.

b) Menyusun rancangan kegiatan program. Pada kegiatan penyusunan rancangan kegiatan ini akan dilakukan kegiatan *brainstorming* diantara semua panitia kegiatan mengenai pelaksanaan bentuk kegiatan, pengisi kegiatan, alat dan bahan yang diperlukan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan tempat pelaksanaan kegiatan. Rancangan kegiatan dibuat sedetail mungkin untuk memudahkan dalam penyusunan proposal kegiatan.

c) Menyusun proposal kegiatan. Penyusunan proposal ini dilakukan dengan melibatkan semua panitia kegiatan. Penyusunan proposal kegiatan ini ditujukan untuk memudahkan dalam upaya memperoleh izin pelaksanaan program, ditujukan dalam upaya mencapai program pemerintah yang sesuai, dan ditujukan untuk memperoleh persetujuan dengan narasumber.

d) Mempersiapkan kebutuhan alat dan bahan. Kegiatan persiapan kebutuhan alat dan bahan merupakan kegiatan pengumpulan alat dan bahan yang sudah direncanakan sebelumnya. Panitia melakukan pengecekan terkait kecukupan alat dan bahan yang diperlukan sesuai perencanaan.

e) Melakukan *briefing*. Kegiatan *briefing* ini diperlukan untuk memastikan koordinasi terakhir sebelum program dilaksanakan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan program. Kegiatan ini akan dipimpin oleh ketua panitia dan diikuti oleh semua panitia.

2) Tahap pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi Akibat Sesar Lembang di Kelurahan Cicaheum akan dilaksanakan sebagai berikut:

a) Sosialisasi Mitigasi Bencana Gempa Bumi.

Kegiatan Sosialisasi Mitigasi Bencana Gempa Bumi akan melibatkan beberapa pihak masyarakat dan

stakeholder akan dimulai dengan kegiatan pemaparan mengenai konsep dan potensi bencana gempa bumi, hasil pemetaan ini kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pemaparan hasil analisis kerentanan, kekuatan, dan risiko yang terdapat di wilayah sekitar Sesar Lembang, termasuk Kelurahan Cicaheum.

Tabel 2.22 Susunan acara Mitigasi Gempa

Kegiatan	**Waktu**	**Durasi**	**Pelaksana**
Persiapan Kegiatan	07.30–08.00	30’	Panitia
Registrasi Peserta	08.00–08.30	30’	Panitia
Pembukaan	08.30–08.45	15’	MC
Sambutan	08.45–09.00	15’	Perwakilan Pemerintah Daerah
Pembacaan Do’a	09.00–09.10	10’	Panitia
Pemaparan materi mengenai potensi bencana gempa yang disebabkan Sesar Lembang	09.10–10.10	60’	BPBD dan Tagana
Pemaparan hasil analisis kerentanan, kekuatan, dan risiko	10.10–11.40	90’	BPBD dan Tagana
Tanya Jawab	11.40–12.00	20’	Peserta
Istirahat	12.00–13.00	60’	Panitia
Dokumentasi	13.00–13.15	15’	Panitia
Penutupan	13.15–13.20	5’	MC

b) Pembentukan Tim Siaga Bencana

Kegiatan pembentukan Tim Siaga Bencana ini menjadi tanggung jawab wilayah masing-masing. Pembentukan Tim Siaga Bencana dimaksudkan adalah sebagai kepanjangan tangan dari BPBD dan TAGANA Kabupaten Bandung. Tim Siaga Bencana akan terdiri dari perwakilan pemerintah desa, perwakilan masyarakat, dan karang taruna. Kelompok-Tim Siaga Bencana ini kemudian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pengurangan risiko dan tanggap

darurat bencana di wilayah Kelurahan Cicaheum.

3) Tahap pengakhiran

a) Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan refleksi atau peninjauan kembali antara proses dengan hasil yang telah dicapai dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam kegiatan evaluasi ini dilakukan dengan dua bentuk, yakni evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan dalam setiap tahapan kegiatan. Tujuan dilakukannya evaluasi proses adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pencapaian tujuan. Evaluasi hasil merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan diakhir kegiatan atau program. Tujuan dilakukannya evaluasi hasil adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan setelah pelaksanaan program.

b) Pelaporan Program

Pelaporan Program Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi Akibat Sesar Lembang di Kelurahan Cicaheum merupakan kegiatan penyusunan laporan pertanggung jawaban secara tertulis dari pelaksanaan program kepada pihak yang memiliki otoritas dan yang sudah terlibat dalam pelaksanaan program, yakni BPBD, TAGANA, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Cicaheum. Pelaporan kegiatan ini juga dapat digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan program-program selanjutnya.

BAB III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Kegiatan praktikum Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial praktikan mengikuti proses yang telah terlaksana yaitu Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana. Dari kegiatan praktikum ini, mahasiswa memperoleh pengalaman praktek dengan pengumpulan data melalui data primer maupun sekunder. Pengumpulan data tersebut mahasiswa lakukan saat mencari data terkait isu-isu profil lulusan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.

Proses kegiatan Praktikum Laboratorium ini secara garis besar berhasil menambah wawasan bagi para praktikan, karena ketika proses praktikum berlangsung para praktikan mengikuti kegiatan pembekalan dari masing-masing narasumber sehingga menambah wawasan serta pengetahuan praktikan baik di dalam lingkup peluang kerja maupun informasi mengenai 5 (lima) profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Melalui adanya kegiatan pembekalan dari narasumber tersebut, tentu mampu memberikan motivasi lebih bagi para praktikan serta menambah rasa optimisme untuk menghadapi tantangan dunia kerja kedepannya tentunya di dalam bidang Pekerjaan Sosial. Selain itu praktikan juga mampu mengasah keterampilan di dalam menyusun rencana intervensi pekerjaan sosial sesuai dengan isue yang sedang berkembang di masyarakat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kegiatan Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang telah diikuti oleh praktikan terkait fokus 5 (lima) profil yaitu Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana, praktikan mengajukan beberapa rekomendasi yang diajukan kepada:

a. Rekomendasi bagi Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial:

1) Diharapkan kedepannya di dalam proses pembuatan pedoman praktikum tidak mengalami perubahan ketika kegiatan praktikum sedang berlangsung karena dengan adanya perubahan tersebut sedikit membingungkan para praktikan dan merasa tidak mendapatkan acuan

yang jelas terkait jalannya kegiatan praktikum laboratorium;

2) Diharapkan kedepannya Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial mampu menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah terutama di dalam membangun relasi dunia kerja bagi lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial;

3) Ketika proses praktikum laboratorium sedang berlangsung, untuk kedepannya diharapkan para praktikan mendapatkan waktu penugasan yang lebih sesuai karena praktikan selain mendapatkan penugasan dari praktikum laboratorium tetapi mendapatkan penugasan pula dari mata kuliah yang sedang diampu;

4) Diharapkan para tim dosen Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial kedepannya mampu mempunyai satu visi yang sama, satu misi yang sama, dan mampu meminimalisir kesalahpahaman yang dialami oleh para praktikan maupun para dosen pembimbing pada saat melakukan proses supervisi kepada para praktikan;

5) Terkait pedoman penulisan laporan akhir untuk kedepannya jangan diinformasikan kepada para praktikan dengan jangka waktu yang semakin mendekati ujian lisan karena dapat menimbulkan rasa panik, rasa kebingungan bagi para praktikan dan mempengaruhi psikologis para praktikan karena semakin terkejar deadline ujian lisan;

b. Rekomendasi bagi Politenik Kesejahteraan Sosial:

1) Meskipun proses kegiatan perkuliahan atau praktikum laboratorium berlangsung secara luring diharapkan pihak Poltekesos terus menekankan kepada mahasiswa agar selalu berpakaian rapih, sopan, dan memakai almamater ketika melaksanakan praktikum laboratorium agar menciptakan kesan rapi.

2) Semoga kedepannya kampus Poltekesos Bandung mampu terus mengembangkan profesi Pekerjaan Sosial di Indonesia dan mampu berperan dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul khususnya dalam bidang Kesejahteraan Sosial demi kemajuan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Amanullah, Rizqi.,dkk. 2019. *Perlindungan Hak Jaminan Kesehatan Bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kota Semarang*

Dhairyya, Ariel Pandita., Herawati, Erna. 2019. *Pemberdayaan Sosial dan Ekonomipada Kelompok Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Bandung* .

Fahrudin, A. (2012). *Pengantar kesejahteraan sosial*. Bandung : PT Refika Aditama.

Koswara, Iwan,. & Mulyana, Slamet. 2016. *Implementasi Model Komunikasi Kelompok Fasilitator Dalam Pelaksanaan Program Rutilahu di Kota Cimahi.*

Pedoman Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Tahun 2021. Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

Rismawati. 2019. *Sesar Lembang : Potensi Bencana di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Suatu Tijauan Yuridis)*

Rustanto, Bambang. (2014). *Sistem Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung :STKSPRESS Bandung.

Suharto, Edi. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial.* Bandung : Refika Aditama.

Vuspita, keke. 2018. *Implementasi Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Koata Pekanbaru*

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Peyandang Disabilitas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

http://repository.uinbanten.ac.id/2698/4/BAB%20II.pdf

https://intelresos.kemensos.go.id/new/?module=Program+Dis&view=asp

db

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permohonan Izin Praktikum Laboratorium

Surat permohonan izin melakukan kegiatan Praktikum

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 367, Bandung 40135 Telepon 022-2504838, 2501330
Fax. 022-2502962, website:www.poltekesos.ac.id, email:humas@poltekesos.ac.id

Nomor : 0141/7.1.8/DL.02.01/01/2023 Bandung, 13 Januari 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin Melaksanakan kegiatan Praktikum Laboratorium

Yth. Lurah Cicaheum
Kecamatan Kiaracondong
Kota Bandung
Jawa Barat
Di
Bandung

Mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dalam proses pembelajarannya, diwajibkan melaksanakan praktik lapangan (praktikum). Kegiatan praktikum laboratorium ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam melakukan asesmen dan rencana intervensi pekerjaan sosial di masyarakat sesuai profil lulusan. Pada proses pelaksanaannya mahasiswa akan menerapkan keterampilan dalam melakukan tahapan praktik pekerjaan sosial yang dimulai dengan melakukan pendekatan awal, kemudian asesmen, dan diakhiri dengan penyusunan rencana intervensi,.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merencanakan menempatkan peserta praktikum mahasiswa Poltekesos Bandung di Kelurahan Cicaheum Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Jawa Barat yang rencana pelaksanaan praktikumnya dimulai tanggal 8 Februari s.d. 15 April 2023 (nama mahasiswa praktikan terlampir).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR,

Marjuki

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial RI ;
2. Pertinggal.

Lampiran 2: Kegiatan Praktikum Laboratorium di Kelurahan Cicaheum

Diskusi bersama Lurah Cicaheum, Bapak Edi M.

Silaturahmi Ketua RW 01, Bapak Diding

Bersama ibu-ibu PKK RW 01

Supervisi Lembaga ke Kelurahan Cicaheum

Perpisahan praktikan dengan pihak Kelurahan Cicaheum

Lampiran 3: Bimbingan Praktikum Laboratorium

Bimbingan pertama dengan pembimbing Ibu Milly M.

Bimbingan kedua bersama pembimbing Ibu Milly Mildawati

Bimbingan ketiga bersama pembimbing Ibu Milly Mildawati